



ANALISIS KETIMPANGAN
PENGELUARAN PENDUDUK
(INDEKS GINI)
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
2014-2016



KERJASAMA

BAPPEDA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN



BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ANALISIS KETIMPANGAN PENGELUARAN PENDUDUK (INDEKS GINI)
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2014-2016

KATA PENGANTAR

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan pembangunan berupaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Hal ini ditandai dengan keinginan untuk tercapainya beberapa indikator makro seperti indeks pembangunan manusia yang tinggi, rendahnya tingkat pengangguran, juga menurunnya kesenjangan pendapatan antar penduduk.

Indeks Gini (*gini ratio*) yang merupakan salah satu alat yang mengukur tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah menunjukkan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki nilai indeks tertinggi se-Indonesia. Oleh karena itu analisis kesenjangan pendapatan antar penduduk di Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi menarik untuk dilaksanakan. Pada analisis ini pendapatan masyarakat didekati dengan nilai pengeluaran konsumsi penduduk.

Analisis Ketimpangan Pengeluaran Masyarakat (Indeks Gini) di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014-2016 disusun hasil kerjasama Balai Statistik Daerah Bappeda Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berisi analisis kesenjangan pengeluaran masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2014 - 2016. Hal ini sebagai upaya mendapatkan gambaran distribusi pendapatan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk merumuskan kebijakan pembangunan untuk menurunkan kesenjangan pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu proses penyelesaian analisis ini. Mudah-mudahan hasilnya dapat bermanfaat dalam proses pembangunan yang dilaksanakan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Yogyakarta, Oktober 2017

Badan Pusat Statistik
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Kepala,

Johanes Debitto Priyono, M.Sc

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Ruang Lingkup Analisis	2
1.3. Tujuan	2
1.4. Sistematika Penulisan	3
2 TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1. Teori Pertumbuhan Ekonomi	5
2.2. Definisi Pembangunan	6
2.3. Distribusi Pendapatan/Pengeluaran	7
2.4. Konsep Kesenjangan	8
2.5. Ukuran-ukuran Tingkat Kesenjangan	9
2.5.1. Indeks Gini dan Kurva Lorenz	11
2.5.2. Kriteria Bank Dunia	12
2.5.3. Indeks Palma	13
3 METODE PENELITIAN	15
3.1. Sumber Data	15
3.2. Metode Analisis	15
3.2.1. Indeks Gini	15
3.2.2. Kriteria Bank Dunia	16
3.2.3. Indeks Palma	17
4 GAMBARAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	19
4.1. Keadaan Penduduk dan Tenaga Kerja D.I. Yogyakarta	19
4.2. Keadaan Perekonomian D.I. Yogyakarta	23
4.3. Kemiskinan di D.I. Yogyakarta	25
5 HASIL DAN PEMBAHASAN	26
5.1. Karakteristik Penduduk Menurut Kelompok Pengeluaran	26
5.1.1. Pendidikan	27
5.1.2. Kesehatan	28
5.1.3. Lapangan Usaha	29
5.2. Analisis Ketimpangan	31
5.2.1. Gini Rasio dan Kurva Lorenz	31
5.2.2. Kriteria Bank Dunia	37
5.2.3. Indeks Palma	39
6 KESIMPULAN DAN SARAN	43
6.1. Kesimpulan	43
6.2. Saran	44

<u>DAFTAR PUSTAKA</u>	<u>46</u>
<u>LAMPIRAN</u>	<u>48</u>

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk di D.I. Yogyakarta Tahun 2014 – 2016	19
Tabel 4.2 Persentase Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Kuantil Pengeluaran Perkapita di D.I. Yogyakarta Tahun 2016	20
Tabel 4.3 Persentase Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Kuantil Pengeluaran Perkapita di DI Yogyakarta Tahun 2015	20
Tabel 4.4 Perubahan Persentase Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Kuantil Pengeluaran Perkapita di DI Yogyakarta Tahun 2015 – 2016 (Persen)	21
Tabel 4.5 Persentase Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama D.I. Yogyakarta Tahun 2014 - 206	21
Tabel 4.6 Persentase Penduduk Yang Bekerja Menurut Pendidikan D.I. Yogyakarta Tahun 2014 – 2016	22
Tabel 4.7 Perekonomian D.I. Yogyakarta Tahun 2014 – 2016.....	23
Tabel 4.8 Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan, Indeks Keparahan Kemiskinan dan Garis Kemiskinan D.I. Yogyakarta Tahun 2014 – 2016.....	25
Tabel 5.1 Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Menurut Kelompok Pengeluaran D.I. Yogyakarta Tahun 2016	27
Tabel 5.2 Persentase Penduduk Menurut Desil Kelompok Pengeluaran dan Tingkat Pendidikan D.I. Yogyakarta Tahun 2016.....	27
Tabel 5.3 Persentase Penduduk Menurut Desil Kelompok Pengeluaran dan Mengalami Keluhan Kesehatan Yang Mengganggu Aktivitas Sehari-hari D.I. Yogyakarta Tahun 2016.....	29
Tabel 5.4 PDRB ADHB, Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja D.I. Yogyakarta Tahun 2016	30
Tabel 5.5 Persentase Penduduk Menurut Lapangan Usaha Dan Desil Kelompok Pengeluaran D.I. Yogyakarta Tahun 2016.....	31

Tabel 5.6 Gini Rasio Menurut Daerah Tempat Tinggal D.I. Yogyakarta dan Indonesia Maret 2015 – Maret 2016.....	34
Tabel 5.7 Gini Rasio di D.I. Yogyakarta Tahun 2014 – 2016	36
Tabel 5.8 Persentase Pengeluaran Oleh Penduduk Menurut Kriteria Bank Dunia di D.I. Yogyakarta Tahun 2014 – 2016	38
Tabel 5.9 Indeks Palma di D.I. Yogyakarta Tahun 2014 – 2016	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kurva U-Terbalik	4
Gambar 2.2 Kurva Lorenz	12
Gambar 4.1 Kontribusi Tiga Sektor Utama Dalam Perekonomian D.I. Yogyakarta Tahun 2014 – 2016	24
Gambar 5.1 Kurva Lorentz DI Yogyakarta Tahun 2014 – 2016	32
Gambar 5.2 Gini Rasio D.I. Yogyakarta dan Indonesia Tahun 2014 – 206	33
Gambar 5.3 Gini Rasio dan Laju Pertumbuhan Ekonomi D.I. Yogyakarta Tahun 2014 – 2016	35
Gambar 5.4 Perkembangan Pangsa Konsumsi untuk 40 persen Penduduk Berpendapatan Terrendah di D.I. Yogyakarta Tahun 2014 – 2016	39
Gambar 5.5 Persentase Penduduk Miskin dan Indeks Palma D.I. Yogyakarta Tahun 2014 – 2016	41



KETIMPANGAN PENGELUARAN PENDUDUK (INDEKS GINI) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

2014

0,389

2015

0,433

2016

0,420



Tingkat Pendidikan

Kelompok Pengeluaran

- 10 persen tertinggi
- Menengah (kelompok 5 dan 6)
- Terbawah

8,8 % kurang dari SD
39,21 % SLTA
35,01 % universitas

SLTA : 31,88% dan 32,17%
Universitas: 5,32% dan 6,94 %

31,03 % kurang dari SD
17,48 % SLTP
19,17 % SLTA
0,73 % universitas

Mengalami Keluhan Kesehatan yang Mengganggu Aktivitas Sehari-hari



Kelompok Pengeluaran

- 10 persen tertinggi
- Menengah
- Terbawah

43,78%

54,72%

43,86%

Gini Rasio dan Laju Pertumbuhan Ekonomi D.I. Yogyakarta 2014 -2016

Pertumbuhan Ekonomi

Gini Rasio

5,17

4,95

5,05

0,389

0,433

0,420

2014

2015

2016

1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Monitoring dan evaluasi capaian berbagai hasil pembangunan saat ini menjadi pembahasan utama di berbagai wilayah di Indonesia. Pembahasan tersebut berawal dari pentingnya upaya mensinkronkan antara pencapaian indikator-indikator perekonomian dengan pencapaian tingkat kesejahteraan masyarakat. Evaluasi terhadap pencapaian hasil-hasil pembangunan ekonomi yang sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat memberikan alternatif bagi setiap daerah untuk melakukan penyesuaian kebijakan pembangunan yang dilakukan.

Hasil evaluasi kinerja pembangunan diharapkan mampu merekomendasikan perubahan pandangan bahwa pertumbuhan ekonomi itu bukan tujuan akhir, tetapi hanya suatu alat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, setiap kreativitas kebijakan ekonomi diharapkan mampu memberikan pengaruh terhadap berbagai hal yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat dan keseimbangan distribusi. Hal ini juga untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati oleh semua kalangan terutama masyarakat yang tingkat ekonominya termasuk golongan menengah ke bawah.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat juga menyebabkan bertambah lebarnya ketimpangan antar golongan masyarakat (yang kaya dan yang miskin) dan ketimpangan antar wilayah (yang maju dan yang tertinggal). Ketimpangan yang makin tinggi antar golongan maupun antar wilayah dapat memunculkan permasalahan antara lain kecemburuan sosial, kerawanan disintegrasi wilayah dan disparitas ekonomi yang makin lebar dan tajam.

Ketimpangan ekonomi pada dimensi distribusi pendapatan merupakan sebuah realita yang ada di tengah-tengah masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Fenomena ini telah menjadi perhatian publik, sehingga upaya

evaluasi yang sangat mendesak dilakukan. Dari hasil evaluasi diharapkan pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta yang cukup pesat pada akhirnya juga akan membawa konsekuensi berkurangnya tingkat ketimpangan pembangunan dan hasil-hasilnya atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi dapat sejalan dengan perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakatnya.

Apabila ketimpangan ini dibiarkan semakin melebar maka akan semakin mendistorsi hasil pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta. Oleh karena itu upaya mengetahui besaran ketimpangan pengeluaran antar golongan penduduk maupun secara spasial perlu dilakukan. Disamping itu juga ketimpangan kesempatan mereka (penduduk menurut golongan pengeluaran) terhadap aktivitas ekonomi dan kebutuhan dasarnya (kesehatan dan pendidikan).

1.2. Maksud dan Ruang Lingkup Analisis

Maksud dari pekerjaan Analisis Ketimpangan Pengeluaran Masyarakat di DIY adalah untuk menyediakan hasil analisis sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan DIY, terutama dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Namun dalam kegiatan ini untuk melihat ketimpangan distribusi pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta selama tiga tahun terakhir, digunakan data pengeluaran konsumsi rumah tangga sebagai pendekatan. Hal ini dengan mengasumsikan bahwa pengeluaran konsumsi bisa menggambarkan kondisi pendapatan masyarakat sehingga akan tergambar suatu perbandingan kesenjangan distribusi pendapatan yang mengacu pada keberhasilan pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.3. Tujuan

Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk mensejahterahkan penduduknya. Oleh karena itu ke pembangunan diharapkan dapat dinikmati oleh semua lapisan penduduknya, Berbagai upaya eliminasi terhadap distorsi pembangunan dilakukan dengan mengetahui ketimpangan bagi secara ekonomi maupun kesempatan.

Adapun tujuan penulisan analisis ketimpangan yaitu :

1. Menghitung ukuran ketimpangan pengeluaran (Indeks Gini dan ukuran ketimpangan terkait).
2. Menganalisis variasi indeks gini dan ukuran ketimpangan terkait menurut kabupaten/kota.
3. Mengidentifikasi faktor penyebab ketimpangan yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Menyediakan rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan untuk peningkatan kualitas perencanaan dan implementasi pembangunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Publikasi ini disusun menjadi enam bab. Bab satu membahas pendahuluan yang berisi latar belakang, maksud dan ruang lingkup analisis, tujuan analisis dan juga sistematika penulisan. Bab dua berisi tinjauan pustaka yang menjabarkan teori pertumbuhan ekonomi, definisi pembangunan, distribusi pendapatan, konsep kesenjangan, ukuran-ukuran tingkat kesenjangan yang terdiri dari indeks gini dan kurva lorenz, kesenjangan menurut kriteria Bank Dunia, Palma Rasio/Indeks Palma. Bab tiga mendeskripsikan data yang digunakan dan metode analisis. Bab empat memberikan gambaran secara umum kondisi Daerah Istimewa Yogyakarta, meliputi kondisi perekonomian, keadaan penduduk dan ketenagakerjaan, serta kemiskinan. Bab lima memaparkan hasil olahan data dan pembahasan mengenai kesenjangan pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam bab ini, dipaparkan karakteristik penduduk menurut kelompok pengeluaran terkait dengan pendidikan, kesehatan dan lapangan usaha. Selain itu, dibahas juga hasil pengukuran kesenjangan berdasarkan Indeks Gini, Kriteria Bank Dunia, dan Indeks Palma. Bab terakhir adalah bab enam, berisi kesimpulan dan saran.

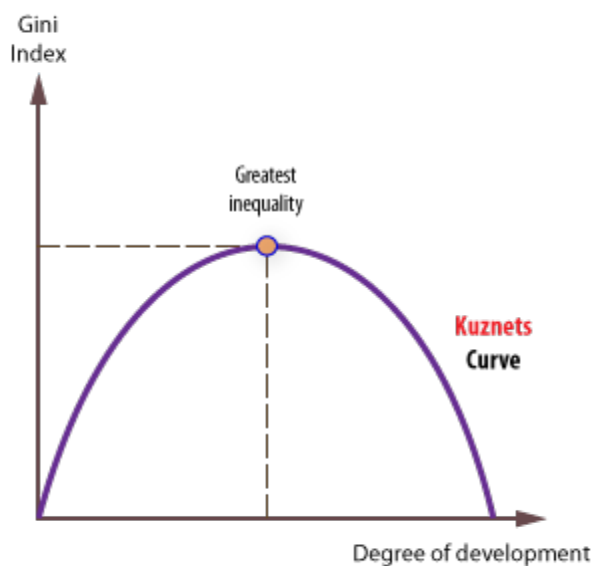
2

TINJAUAN PUSTAKA

Membicarakan masalah kesenjangan tidak dapat dipisahkan dari pembahasan mengenai pembangunan, karena kesenjangan sering kali dijadikan sebagai salah satu ukuran keberhasilan pembangunan di suatu daerah, seperti yang dijabarkan *Dudleey Seer* bahwa menurunnya tingkat kesenjangan pendapatan, jumlah penduduk miskin dan pengangguran merupakan indikator keberhasilan pembangunan dari suatu daerah (Todaro dan Smith, 2012)

Hubungan antara pembangunan dan kesenjangan pendapatan telah menjadi fokus perhatian akademik sejak bertahun-tahun lalu. *Simon Kuznet* memprakarsai kajian dengan melihat korelasi antara 2 variable tersebut (Ray, 1998). Dalam *paper*-nya yang kemudian menjadi acuan banyak peneliti, Kuznets (1955) mengungkapkan bahwa hubungan antara tingkat distribusi pendapatan dan tingkat pembangunan ekonomi mengambil bentuk seperti U-terbalik (*inverted-U curve*).

Gambar 2.1 Kurva U-terbalik



Dengan kata lain, pada awal perkembangan ekonomi, distribusi pendapatan akan menyebabkan kesenjangan pendapatan semakin tinggi,

tetapi seiring dengan semakin matangnya sebuah perekonomian, kesenjangan pendapatan tersebut akan menurun perlahan setelah melewati titik puncak.

2.1. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Djojohadikusumo (1987) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi bertumpu pada proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Sedangkan pembangunan ekonomi mengandung pengertian yang lebih luas dan mencakup perubahan pada tata susunan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Pembangunan merupakan proses transformasi yang dalam perjalanan waktu ditandai dengan perubahan struktural yakni perubahan pada landasan kegiatan ekonomi maupun pada kerangka susunan ekonomi masyarakat yang bersangkutan.

Selama tiga dasawarsa perhatian utama pembangunan pada cara mempercepat tingkat pertumbuhan pendapatan nasional, baik negara maju/kaya maupun negara terbelakang/miskin, baik yang menganut sistem kapitalis, sosialis maupun campuran selalu mengutamakan pertumbuhan ekonomi. Seperti diketahui bahwa suatu keberhasilan program pembangunan di negara berkembang sering dimulai berdasarkan tinggi rendahnya tingkat pertumbuhan output dan pendapatan nasional.

Baik buruknya kualitas kebijakan pemerintah dan tinggi rendahnya mutu aparat di bidang ekonomi secara keseluruhan biasanya diukur berdasarkan kecepatan pertumbuhan output yang dihasilkan. Namun demikian penyebaran pertumbuhan pendapatan tersebut masih sangat terbatas jangkauannya, kekuatan antara negara maju dan negara berkembang tidak seimbang sehingga cenderung memperlebar jurang kesenjangan antara kelompok negara kaya dan negara miskin.

Di negara berkembang perhatian utama terfokus pada dilema antara pertumbuhan dan pemerataan. Pembangunan ekonomi mensyaratkan *Gross National Product* (GNP) yang lebih tinggi dan juga pertumbuhan yang lebih tinggi merupakan suatu pilihan yang harus diambil. Namun yang menjadi masalah adalah bukan hanya soal bagaimana caranya memacu pertumbuhan, tetapi juga siapa yang melaksanakan dan berhak menikmati hasilnya. Dengan demikian pembangunan ekonomi tidak semata-mata

diukur berdasarkan peningkatan GNP secara keseluruhan, tetapi harus memperhatikan distribusi pendapatan telah meyebar ke segenap penduduk/lapisan masyarakat, serta siapa yang telah menikmati hasilnya (Todaro, 2000).

2.2. Definisi Pembangunan

Menurut Todaro dan Smith (2006) pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat dan institusi-institusi nasional disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan kesenjangan pendapatan serta pengentasan kemiskinan. Jadi pada hakikatnya, pembangunan itu harus mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual maupun kelompok-kelompok sosial yang ada di dalamnya, untuk bergerak maju menuju suatu kondisi kehidupan yang serba lebih baik secara material maupun spiritual.

Proses pembangunan di semua masyarakat paling tidak harus memiliki tiga tujuan inti sebagai berikut:

1. Peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang kebutuhan hidup yang pokok seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan perlindungan keamanan.
2. Peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan, tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan, yang kesemuanya itu tidak hanya untuk memperbaiki kesejahteraan material, melainkan juga menumbuhkan harga diri pada pribadi dan bangsa yang bersangkutan.
3. Perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan, yakni dengan membebaskan mereka dari belitan sikap menghamba dan ketergantungan, bukan hanya terhadap orang atau negara-bangsa lain, namun juga terhadap setiap kekuatan yang berpotensi merendahkan nilai-nilai kemanusiaan mereka.

2.3. Distribusi Pendapatan/Pengeluaran

Distribusi pendapatan adalah konsep yang lebih luas dibandingkan analisis kemiskinan karena cakupannya tidak hanya menganalisa populasi yang berada dibawah garis kemiskinan saja, melainkan ketidakmerataan pendapatan antar kelompok masyarakat dalam suatu daerah, ketidakmerataan inilah yang kerap didefinisikan sebagai kesenjangan (*inequality*) dalam distribusi pendapatan (Wibowo, 2012).

Berbicara mengenai kesenjangan, maka kita berbicara bukan hanya mengenai tingkat pendapatan secara absolut, secara intuitif kesenjangan berbicara mengenai perbedaan standar hidup secara relatif dari suatu kelompok masyarakat atau antar kelompok masyarakat (*between* dan *within*).

Kesenjangan sendiri merupakan topik bahasan yang seakan tidak pernah lekang dari perhatian, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Kesenjangan seringkali dijadikan patokan ukuran pembangunan selain dari tingkat pendapatan agregat (seperti Pendapatan Domestik Bruto), karena dapat memberikan alternatif pengukuran tingkat pendapatan secara relatif antar kelas pendapatan, dengan kata lain kita tertarik untuk mengetahui seberapa kayakah orang kaya di suatu masyarakat dan seberapa miskinlah orang miskin di suatu masyarakat dan mengukur perbandingan relatif antar dua kelompok masyarakat tersebut.

Distribusi pendapatan suatu daerah dapat menentukan bagaimana pendapatan daerah yang tinggi mampu menciptakan perubahan-perubahan dan perbaikan-perbaikan dalam masyarakat, seperti mengurangi kemiskinan, pengangguran dan kesulitan-kesulitan lain dalam masyarakat.

Distribusi pendapatan yang tidak merata tidak akan menciptakan kemakmuran bagi masyarakat secara umum, tetapi hanya akan menciptakan kemakmuran bagi golongan tertentu. Antara pertumbuhan ekonomi yang pesat dan distribusi pendapatan terdapat suatu *trade off* yang membawa implikasi bahwa pemerataan dalam pembagian pendapatan hanya dapat dicapai jika laju pertumbuhan ekonomi diturunkan. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan selalu disertai dengan memburuknya distribusi pendapatan atau terjadi kenaikan kesenjangan relatif.

2.4. Konsep Kesenjangan

Debraj Ray mengungkapkan konsep kesenjangan dengan *“how benefit of economy is distributed among people or region”* (Ray, 1998). Sementara Ravallion (2003) menyatakan bahwa *“inequality is about the disparities in levels of living”*. Dia kemudian membedakan kesenjangan menjadi ‘kesenjangan relatif’ dan ‘kesenjangan absolut’. Kesenjangan relatif tergantung dari rasio pendapatan individu terhadap rata-rata pendapatan secara keseluruhan. Sehingga, jika semua pendapatan naik dengan tingkat yang sama, maka kesenjangan relatif menjadi tidak berubah. Kesenjangan absolut merupakan pengukuran kesenjangan dengan menggunakan parameter dengan suatu nilai mutlak.

Selain itu, Yusuf (dalam Prastowo dan kawan-kawan, 2014) menyatakan bahwa terkait dengan ketimpangan, harus dibedakan antara ketimpangan hasil dan ketidaksetaraan kesempatan. Ketimpangan hasil seperti halnya pendapatan bukan hanya terkait dengan kemampuan individu semata tetapi juga terkait dengan situasi dan kondisi di luar kendali individu tersebut. Berdasarkan data yang ada, tingkat kesenjangan tidak terjadi secara alami. Mestrum menjelaskan bahwa kesenjangan yang terjadi antara negara di Afrika dengan Eropa terjadi sebagai akibat dari hubungan perdagangan. Selain itu, globalisasi yang membawa arus modal dari negara maju ke negara miskin pada beberapa kasus yang terjadi juga menjadi penyebab semakin melebarnya kesenjangan ekonomi. Kebijakan untuk mengatasi ketimpangan hasil salah satunya adalah dengan melakukan distribusi hasil yang merata, namun kebijakan ini dinilai kurang populer. Sebaliknya, kebijakan untuk menyetarakan peluang bagi setiap individu dinilai lebih mendapat dukungan dari semua kalangan.

Dalam melakukan analisa kesenjangan, kita memerlukan suatu ukuran yang dapat menangkap pola distribusi pendapatan, kemudian menghasilkan angka yang dapat diinterpretasikan dan diperbandingkan, baik antar waktu maupun antar sub-sample dan sample, selain juga mampu menunjukkan derajat kesenjangan (Hindriks dan Myles, 2006).

Masalah kesenjangan dalam distribusi pendapatan dapat ditinjau dari tiga segi, yaitu :

1. Distribusi Pendapatan Antar Golongan Pendapatan (*Size Distribution of Income*) atau kesenjangan relatif.
- 2 . Distribusi Pendapatan Antara Daerah Perkotaan dan Pedesaan (*Urban-Rural Income Disparities*). Banyak ahli yang menyatakan bahwa pola pembangunan Indonesia memperlihatkan suatu fenomena yang disebut urban bias, yaitu pembangunan yang berorientasi ke daerah perkotaan, dengan tekanan yang berat pada sektor industri yang terorganisir, yang merupakan sebab terjadinya kesenjangan distribusi pendapatan yang lebih parah lagi di kemudian hari. Fenomena urban bias ini seringkali terjadi di negara-negara berkembang seperti Indonesia dimana alokasi sumber-sumber daya lebih banyak diprioritaskan di daerah perkotaan daripada pertimbangan pemerataan atau efisiensi.
- 3 . Distribusi Pendapatan Antar Daerah (*Regional Income Disparity*). Kesenjangan dalam perkembangan ekonomi antar berbagai daerah di Indonesia serta penyebaran sumber daya alam yang tidak merata menjadi penyebab tidak meratanya distribusi pendapatan antar daerah di Indonesia khususnya.

2.5. Ukuran-ukuran Tingkat Kesenjangan

Di dalam melakukan analisa kesenjangan di suatu wilayah, kita memerlukan alat atau ukuran-ukuran yang dapat menimbang tingkat kesenjangan di suatu wilayah. Ada beberapa indeks yang diciptakan untuk mengukur kesenjangan di suatu wilayah, diantaranya Indeks Williamson, Atkinson, Gini Koefisien, Theil Indeks dan lain-lain, bahkan Bank Dunia menciptakan kriteria umum untuk membandingkan tingkat kesenjangan. Pada publikasi ini, digunakan Indeks Gini sebagai ukuran kesenjangan yang paling umum dipakai.

Dalam melakukan analisis distribusi pendapatan, saat memilih

ukuran kesenjangan, kita mengharapkan ukuran tersebut merupakan ukuran distribusi rumah tangga dalam ukuran tunggal (*single measure*). Menurut (Hindriks dan Myles, 2006), kriteria-kriteria bagi sebuah ukuran kesenjangan yang baik adalah sebagai berikut:

- ✓ **Tidak tergantung pada nilai rata-rata** (*mean independence*)
Ini berarti bahwa jika semua pendapatan bertambah dua kali lipat, ukuran kesenjangan seharusnya tidak berubah.
- ✓ **Dapat diperbandingkan**
Suatu ukuran distribusi pendapatan diharapkan dapat memberikan suatu angka ukuran kesenjangan yang dapat diperbandingkan, baik di dalam suatu daerah, interregional maupun secara intertemporal.
- ✓ **Sensitif terhadap transfer pendapatan**
Suatu ukuran distribusi pendapatan diharapkan dapat menangkap perubahan distribusi pendapatan ketika terjadi mekanisme transfer pendapatan dari rumah tangga berpendapatan tinggi ke rumah tangga dengan pendapatan lebih rendah, walaupun total pendapatan masyarakat secara agregat tidak berubah. Sensitivitas terhadap transfer ini dikenal juga dengan "*Pigou- Dalton Principal of Transfer*".

Sementara kriteria tambahan bagi ukuran kesenjangan yang baik adalah:

- ✓ **Tidak tergantung jumlah populasi** (*population size independence*)
Jika populasi berubah, ukuran kesenjangan seharusnya tidak berubah, jika kondisi lain tetap (*ceteris paribus*).
- ✓ **Simetris**
Jika antar populasi bertukar tempat tingkat pendapatannya, seharusnya tidak akan ada perubahan dalam ukuran kesenjangan.

Dilihat dari kriteria-kriteria yang harus dimiliki indeks, Indeks Gini memenuhi kriteria-kriteria sebagai indeks yang mengukur kesenjangan pendapatan di suatu daerah.

2.5.1. Indeks Gini dan Kurva Lorenz

Parameter yang sering digunakan untuk mengukur distribusi pendapatan ini adalah Angka Gini Rasio yang juga sering disebut Indeks Gini atau lengkapnya *Gini Concentration Ratio*. Indeks Gini/Gini Rasio merupakan salah satu teknik statistik untuk mengukur kesenjangan pendapatan. Keistimewaan dari alat ukur ini adalah dapat ditampilkan secara geometris, sehingga mempunyai dua aspek sekaligus yaitu aspek visual melalui kurva yang disebut kurva lorenz dan aspek matematis.

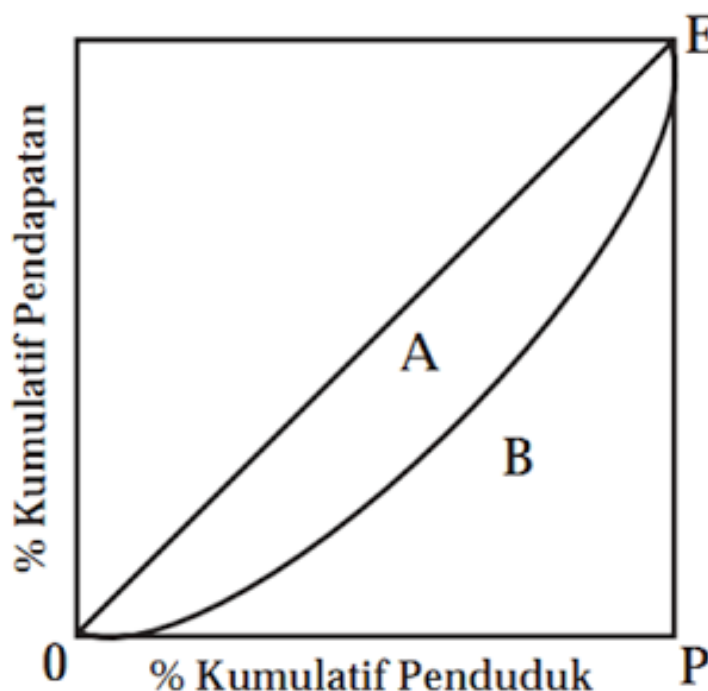
Ukuran kesenjangan ini juga memenuhi *desirable property* dari ukuran kesenjangan, namun demikian Indeks Gini tidak dapat diuraikan menjadi bagian yang bisa dijumlahkan (*additively decomposable*). Angka Gini Rasio sebagai ukuran pemerataan pendapatan mempunyai selang nilai antara nilai 0 (nol) dan 1 (satu). Gini Rasio sama dengan 0 (nol) menunjukkan kesenjangan sebaran pendapatan yang rendah (pemerataan sempurna). Sedang nilai 1 (satu) menunjukkan tingkat kesenjangan sebaran yang tinggi (kesenjangan sempurna). Walaupun demikian, menurut Michael Todaro seorang ahli ekonomi pembangunan dari Italia menyebutkan bahwa:

- a. Gini Ratio terletak antara 0,50 – 0,70 menandakan pemerataan sangat timpang.
- b. Sedangkan apabila nilainya terletak antara 0,36 – 0,49 menunjukkan kesenjangan sedang.
- c. Sementara apabila terletak diantara 0,20 – 0,35 dinyatakan pemerataan relatif tinggi (merata).

Dalam hal ini, kenyataannya tidak mungkin suatu daerah/wilayah mempunyai angka gini ratio yang besarnya sama dengan 0 (nol) dan 1 (satu).

Secara visual, indeks Gini dapat dijelaskan dengan menggunakan kurva lorenz, yaitu kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pengeluaran) dengan distribusi seragam yang mewakili persentase kumulatif penduduk.

Gambar 2.2 Kurva Lorenz



Grafik persentase kumulatif penduduk yang diurut dari termiskin ke yang terkaya digambar pada sumbu hoizontal dan persentase kumulatif pengeluaran digambar pada sumbu vertikal. Indeks gini merupakan formula yang menghitung rasio luas bidang antara garis diagonal (*perfect equality*) dan kurva lorenz. Semakin jauh jarak kurva lorenz dengan garis diagonal, maka tingkat kesenjangannya semakin tinggi.

2.5.2. Kriteria Bank Dunia

Ukuran kesenjangan pendapatan kriteria Bank Dunia merupakan indikator untuk mengukur tingkat ketimpangan dengan memfokuskan pada berapa besar persentase yang diterima oleh 40 persen kelompok penduduk dengan penghasilan terendah terhadap seluruh pendapatan penduduk di suatu daerah. Indikator ini membagi penduduk menjadi tiga kelompok, yaitu:

- ✓ Kelompok 40 persen penduduk yang berpendapatan rendah
- ✓ Kelompok 40 persen penduduk yang berpendapatan menengah
- ✓ Kelompok 20 persen penduduk yang berpendapatan tinggi

Selanjutnya tingkat ketimpangan pendapatan penduduk menurut Bank Dunia terpusat pada kelompok 40 persen penduduk berpendapatan rendah, dengan kriteria sebagai berikut

- a. Bila persentase pendapatan yang diterima oleh kelompok tersebut **lebih kecil dari 12 persen**, berarti tingkat ketimpangan sebaran pendapatan tergolong “**tinggi**”.
- b. Bila kelompok tersebut **menerima 12 sampai 17 persen** dari total pendapatan, berarti tingkat ketimpangan sebaran pendapatan “**sedang**”.
- c. Bila kelompok tersebut **menerima lebih dari 17 persen** dari total pendapatan, berarti tingkat ketimpangan sebaran pendapatan “**rendah**”.

2.5.3. Indeks Palma

Indeks Palma adalah rasio pembagian pendapatan dari 10 persen penduduk dengan pendapatan tertinggi terhadap pendapatan 40 persen penduduk pendapatan terendah. Indeks ini telah dikembangkan oleh Gabriel Palma berdasarkan pengamatan yang dilakukannya terhadap distribusi pendapatan menurut kelompok. Indeks ini didasarkan pada pengamatan bahwa ‘kelas menengah’ cenderung meraih sekitar 50 persen dari pendapatan nasional, tetapi sisa separuh dari pendapatan nasional dibagi antara 10 persen mereka yang terkaya dan 40 persen mereka yang termiskin. Cobhan dan Sumner (2013) berpendapat bahwa salah satu keunggulan dari rasio Palma adalah kemudahannya dalam diinterpretasikan. Selain itu, dengan memfokuskan pada kelompok teratas dan terbawah dalam distribusi pendapatan, maka indeks ini dapat menjadi indikator yang lebih relevan untuk kebijakan yang terkait dengan sejauh mana tingkat ketidaksetaraan di setiap negara, dan bisa jadi sangat relevan dengan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Jika indeks sebesar 0,25 berarti terjadi kesetaraan yang sempurna antara kelompok terkaya dan termiskin (Yusuf dalam Prastowo, dkk, 2014). Dengan kata lain, nilai indeks yang semakin mendekati 0,25 menunjukkan bahwa distribusi pengeluaran atau pendapatan yang ada mendekati

seimbang. Nilai indeks ini tidak mempunyai batasan maksimum. Semakin besar nilai Indeks Palma semakin besar disparitas antara penduduk terkaya dengan penduduk termiskin.

Salah satu keunggulan Indeks Palma adalah kemudahannya untuk diartikan. Jika nilai indeks ini adalah 2, maka berarti 10 persen kelompok terkaya menikmati dua kali lipat bagian dari pendapatan nasional dibandingkan dengan 40 persen kelompok termiskin.

3

METODE PENELITIAN

3.1. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penghitungan indikator kesenjangan adalah data yang berasal dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret tahun 2014, 2015 dan 2016. Responden Susenas tersebar di lima kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta, dengan jumlah responden setiap tahun sebesar 3.760 rumah tangga.

Selain itu, sebagai data pendukung juga digunakan data yang terkait dengan variabel kependudukan, ketenagakerjaan, kemiskinan dan perekonomian. Sumber data tersebut sebagian berasal dari publikasi yang telah diterbitkan oleh BPS Provinsi D.I. Yogyakarta maupun BPS kabupaten/kota se-D.I. Yogyakarta.

3.2. Metode Analisis

Terdapat tiga indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan di D.I. Yogyakarta tahun 2014 -2016.

3.2.1. Indeks Gini

Indeks Gini atau Gini Rasio adalah ukuran yang paling sering dan umum digunakan dalam mengukur tingkat kesenjangan pendapatan/pengeluaran. Indeks ini banyak digunakan karena memenuhi *desirable property* dari ukuran kesenjangan, namun demikian Indeks Gini tidak dapat diuraikan menjadi bagian yang bisa dijumlahkan (*additively decomposable*).

Teknis penghitungan dengan menggunakan Gini Rasio adalah sebagai berikut: misalkan terdapat n rumah tangga dalam suatu sampel. Selanjutnya ke- n rumah tangga tersebut diurutkan berdasarkan pengeluaran dari rumah tangga yang mempunyai pengeluaran per kapita terkecil hingga rumah tangga yang mempunyai pengeluaran terbesar, yaitu

$$y_1 \leq y_2 \leq y_3 \leq \dots \leq y_n.$$

Selanjutnya Gini Rasio dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$GR = 1 - \sum_{i=1}^n (P_i - P_{i-1})(Y_i - Y_{i-1})$$

dimana

GR = Gini Rasio

P_i = Proporsi kumulatif dari penerima pendapatan i

Y_i = Proporsi kumulatif pengeluaran per kapita i

n = Jumlah Observasi.

Setelah diperoleh nilai Gini Rasio, dengan menggunakan kriteria yang dikembangkan oleh Michael Todaro seorang ahli ekonomi pembangunan dari Italia dapat dilakukan klasifikasi sebagai berikut:

- a. Gini Ratio terletak antara 0,50 – 0,70 menandakan pemerataan sangat timpang.
- b. Sedangkan apabila nilainya terletak antara 0,36 – 0,49 menunjukkan kesenjangan sedang.
- c. Sementara apabila terletak diantara 0,20 – 0,35 dinyatakan pemerataan relatif tinggi (merata).

3.2.2. Kriteria Bank Dunia

Pada prinsipnya Kriteria Bank Dunia membagi penduduk ke dalam 3 (tiga) kelompok pendapatan yaitu 40 persen kelompok penduduk berpendapatan rendah, 40 persen kelompok penduduk berpendapatan sedang dan 20 persen kelompok berpendapatan tinggi.

Pengelompokan seperti ini pada dasarnya sama dengan menggunakan cara desil (*decile*) yaitu 40 persen pertama sama dengan desil ke-4; 40 persen kedua sama dengan desil ke-8 dan 20 persen terakhir adalah desil ke-10.

Dalam menentukan besarnya desil ke- i digunakan rumus :

$$D_i = Q_b + \frac{(n_i - P_i)}{(P_a - P_b)} (Q_a - Q_b)$$

dimana

$i = 1, 2, 3, \dots 10$

n_i = Persentase ke- i

D_i = Desil ke- i

Q_b = Persen kumulatif dari kelas pendapatan sebelum D_i

Q_a = Persen kumulatif dari kelas pendapatan sesudah D_i

P_b = Persen kumulatif dari jumlah penduduk sebelum D_i

P_a = Persen kumulatif dari jumlah penduduk sesudah D_i

Selanjutnya dari hasil penghitungan tersebut dilakukan penilaian dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

- a. Bila persentase pendapatan yang diterima oleh kelompok tersebut **lebih kecil dari 12 persen**, berarti tingkat ketimpangan sebaran pendapatan tergolong “**tinggi**”.
- b. Bila kelompok tersebut **menerima 12 sampai 17 persen** dari total pendapatan, berarti tingkat ketimpangan sebaran pendapatan “**sedang**”.
- c. Bila kelompok tersebut **menerima lebih dari 17 persen** dari total pendapatan, berarti tingkat ketimpangan sebaran pendapatan “**rendah**”.

3.2.3 Indeks Palma

Indeks yang dikembangkan oleh Gabriele Palma merupakan ukuran kesenjangan yang relatif masih baru. Dalam website-nya, Alex Cobham mengilustrasikan bahwa indeks ini merupakan penyederhanaan dari Gini Rasio dengan memfokuskan penghitungan hanya pada dua sisi ekstrim kelompok pendapatan yang ada (<http://uncounted.org/palma/>). Indeks ini disusun dengan membandingkan antara 10 persen kelompok terkaya dan 40 persen kelompok termiskin. Adapun formula penghitungan Indeks Palma adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks Palma} = \frac{\text{pengeluaran 10\% penduduk berpendapatan tertinggi}}{\text{pengeluaran 40\% penduduk berpendapatan terendah}}$$

Salah satu keunggulan indeks ini adalah kemudahannya untuk diinterpretasikan. Angka yang diperoleh menunjukkan seberapa besar

konsumsi yang dikeluarkan oleh 10% penduduk terkaya dibandingkan dengan 40% penduduk termiskin. Tidak ada batasan maksimum untuk nilai Indeks Palma. Namun demikian jika nilainya semakin besar maka kesenjangan yang terjadi antara kelompok 10 persen terkaya dan 40 persen termiskin semakin besar. Sementara itu, Yusuf (dalam Prastowo, dkk, 2014) menyatakan bahwa jika Indeks Palma sebesar 0,25 berarti terjadi kesetaraan yang sempurna.

4

GAMBARAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

4.1. Keadaan Penduduk dan Tenaga Kerja D.I. Yogyakarta

Berdasarkan hasil penghitungan proyeksi penduduk Indonesia 2010 – 2035, pada tahun 2016, jumlah penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta tercatat sebesar 3,72 juta jiwa (BPS DIY, 2017). Dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2015 yang sebesar 3,67 juta jiwa, maka laju pertumbuhan penduduk pada periode tersebut adalah sebesar 1,13 persen.

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk di D.I. Yogyakarta Tahun 2014 – 2016

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)			Laju Pertumbuhan Penduduk (Persen)	
	2014	2015	2016	2014 - 2015	2015 – 2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01 Kulon Progo	407.709	412.198	416.683	1,10	1,09
02 Bantul	959.445	971.551	983.527	1,26	1,24
03 Gunungkidul	707.794	715.282	722.479	1,06	1,01
04 Sleman	1.154.501	1.167.481	1.180.479	1,12	1,11
71 Yogyakarta	407.667	412.704	417.744	1,24	1,22
D.I. Yogyakarta	3.637.116	3.679.176	3.720.912	1,16	1,13

Sumber: BPS DIY, 2017

Berdasarkan data Susenas Maret 2015 dan Maret 2016, persentase penduduk menurut kelompok kuantile pengeluaran per kapita untuk DI. Yogyakarta relatif terdistribusi dengan merata untuk semua kelompok pendapatan. Namun Jika membandingkan angka antar kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta, terlihat bahwa distribusi penduduk tidak tersebut merata. Pada tahun 2016, di kabupaten Gunungkidul dan Kulon Progo, penduduk relatif terkonsentrasi pada pada kuantil pengeluaran menengah ke bawah (kelompok kuantil 1 sampai dengan 3). Sebaliknya pada tahun yang sama,

penduduk di Sleman dan Kota Yogyakarta relatif terkonsentrasi pada kelompok pengeluaran atas.

Tabel 4.2 Persentase Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Kuantil Pengeluaran Perkapita di DI Yogyakarta Tahun 2016

Kabupaten/Kota	Kelompok Quantile					
	1	2	3	4	5	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01 Kulon Progo	36,63	18,28	24,38	13,27	7,44	100,00
02 Bantul	20,59	23,25	18,05	22,07	16,03	100,00
03 Gunungkidul	34,01	21,59	30,02	10,01	4,36	100,00
04 Sleman	7,59	17,62	16,94	26,20	31,65	100,00
71 Yogyakarta	12,86	18,11	11,41	21,73	35,89	100,00
D.I. Yogyakarta	20,00	20,01	19,99	20,02	19,99	100,00

Sumber: Susenas Maret 2016, diolah

Tabel 4.3 Persentase Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Kuantil Pengeluaran Perkapita di DI Yogyakarta Tahun 2015

Kabupaten/Kota	Kelompok Quantile					
	1	2	3	4	5	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01 Kulon Progo	28,19	27,43	20,23	13,36	10,79	100,00
02 Bantul	17,19	20,16	19,16	26,21	17,28	100,00
03 Gunungkidul	35,76	27,77	21,19	10,67	4,61	100,00
04 Sleman	12,00	15,86	20,78	22,76	28,59	100,00
71 Yogyakarta	14,14	10,26	17,45	20,24	37,90	100,00
D.I. Yogyakarta	20,02	19,97	20,00	20,01	20,00	100,00

Sumber: Susenas Maret 2015, diolah

Tabel 4.4 menunjukkan perubahan persentase penduduk menurut kabupaten/kota dan kelompok pengeluaran. Dari tabel tersebut terlihat bahwa penduduk pada kelompok menengah atas mengalami kenaikan 0,01 poin dan kelompok bawah atas juga mengalami kenaikan 0,04 poin. Pada saat yang bersamaan disetiap kuantil secara absolut jumlah penduduknya

mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan jumlah penduduk terjadi disemua quantile akan tetapi percepatan kenaikan terjadi di quantil menengah atas dan bawah atas. Indikasi ini menunjukkan adanya kenaikan pengeluaran perkapita penduduk pada 2 quantile diatas.

Tabel 4.4 Perubahan Persentase Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Kuantil Pengeluaran Perkapita di D.I. Yogyakarta Tahun 2015 – 2016 (persen)

Kabupaten/Kota	Kelompok Quantile				
	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01 Kulon Progo	8,43	(9,15)	4,15	(0,08)	(3,35)
02 Bantul	3,40	3,09	(1,10)	(4,14)	(1,25)
03 Gunungkidul	(1,74)	(6,18)	8,83	(0,65)	(0,25)
04 Sleman	(4,41)	1,76	(3,84)	3,44	3,06
71 Yogyakarta	(1,28)	7,85	(6,04)	1,49	(2,02)
D.I. Yogyakarta	(0,02)	0,04	(0,01)	0,01	(0,01)

Sumber: Susenas Maret 2015 dan 2016, diolah

Angka dalam kurung menunjukkan angka negatif

Tabel 4.5 Persentase Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama D.I. Yogyakarta Tahun 2014 – 2016

Lapangan Usaha	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
Pertanian	25,41	23,08	23,27
Pertambangan, Listrik , Gas dan Air	0,86	0,96	1,25
Industri Pengolahan	13,97	14,61	12,83
Bangunan	7,48	8,19	6,55
Perdagangan Besar, Eceran, & Rumah Makan	25,86	25,67	28,89
Angkutan, Pergudangan, & Komunikasi	3,52	3,23	3,68
Keuangan	3,75	3,00	2,78
Jasa-jasa	19,14	21,25	20,75

Sumber: BPS DIY, 2017

Dari kecenderungan selama periode 2014 -2016, terlihat adanya pergeseran tenaga kerja dari sektor pertanian menuju sektor-sektor yang lain. Demikian juga halnya dengan sektor industri yang mulai ditinggalkan oleh tenaga kerja di D.I. Yogyakarta. Sementara itu, meskipun masih berfluktuasi terlihat bahwa penyerapan tenaga kerja di sektor perdagangan dan rumah makan; dan sektor jasa-jasa menunjukkan kecenderungan yang meningkat.

Adapun sektor-sektor perekonomian di luar keempat sektor tersebut menunjukkan penyerapan tenaga kerja di bawah 10 persen dan cenderung stagnan.

**Tabel 4.6 Persentase Penduduk Yang Bekerja Menurut Pendidikan
D.I. Yogyakarta Tahun 2014 – 2016**

Lapangan Usaha	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
< SD	14,61	13,45	13.17
SD	18,31	18,43	18.70
SLTP	18,49	18,14	16.94
SLTA	32,96	34,79	35.18
Universitas	15,63	15,19	16.01

Sumber: BPS DIY, 2017

Struktur ketenagakerjaan di D.I. Yogyakarta, didominasi oleh tenaga kerja dengan tingkat pendidikan SLTA. Pada tahun 2014, jumlah tenaga kerja dengan tingkat pendidikan SLTA tercatat sebanyak 32,96 persen. Selanjutnya tenaga kerja dengan tingkat pendidikan SLTA tersebut terus mengalami peningkatan.

Adapun tingkat pendidikan SD dan dibawahnya cenderung mengalami penurunan. Sebaliknya, tenaga kerja dengan tingkat pendidikan Universitas, meskipun menunjukkan adanya fluktuasi namun terlihat menunjukkan trend yang meningkat.

4.2. Keadaan Perekonomian D.I. Yogyakarta

Salah satu indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat kemajuan suatu wilayah adalah pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Terlepas dari adanya kritik yang meragukan kemampuan indikator ini untuk mengukur tingkat kesejahteraan, namun sejauh ini indikator tersebut masih dianggap sebagai alat ukur yang sederhana dan mudah digunakan. Haapanen dan Tapio (2016) menyarankan bahwa indikator pertumbuhan ekonomi masih relevan untuk digunakan namun dengan pemahaman yang lebih selektif.

Pada tahun 2014, laju pertumbuhan ekonomi di D.I. Yogyakarta tercatat sebesar 5,17 persen. Pada tahun 2015, terjadi perlambatan pada pertumbuhan ekonomi menjadi 4,95 persen. Setahun berikutnya pertumbuhan ekonomi sedikit mengalami kenaikan menjadi 5,05 (BPS DIY, 2017). Laju pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil pada kisaran 5 persen tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk di D.I Yogyakarta.

**Tabel 4.7 Perekonomian D.I. Yogyakarta
Tahun 2014 – 2016**

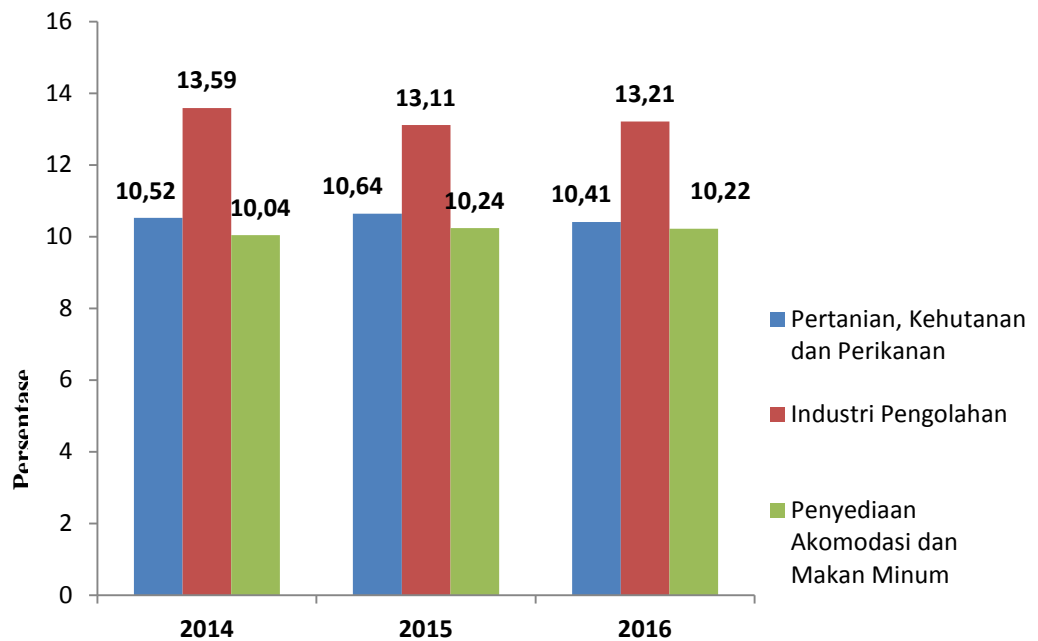
Uraian	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
Produk Domestik Regional Bruto ADHB (miliar rupiah)	92.842	101.448	110.098
Laju Pertumbuhan Ekonomi (persen)	5,17	4,95	5,05
PDRB per kapita (ribu rupiah)			
- ADHB	25.526	27.573	29.589
- ADHK	21.868	22.688	23.566

Sumber: BPS DIY, 2017

Peningkatan kegiatan ekonomi yang ditandai dengan laju pertumbuhan ekonomi diharapkan membawa konsekuensi secara langsung pada peningkatan pendapatan. Pada gilirannya hal tersebut diharapkan dapat membawa kesejahteraan bagi penduduk di D.I Yogyakarta.

Selain pertumbuhan ekonomi, kondisi perekonomian di suatu wilayah juga sangat dipengaruhi oleh struktur ekonomi di wilayah tersebut. Struktur perekonomian di suatu wilayah memberikan gambaran mengenai aktivitas sektor apa saja yang berperan dalam kegiatan ekonomi. Selain itu, struktur ekonomi juga memberikan gambaran mengenai tingkat dan perkembangan teknologi di suatu daerah.

Gambar 4.1 Kontribusi Tiga Sektor Utama dalam Perekonomian D.I. Yogyakarta Tahun 2014 – 2016



Sumber: BPS DIY, 2017

Dalam kurun waktu 2014 -2016, terlihat bahwa sektor pertanian hanya berkontribusi sebesar 10 persen terhadap perekonomian D.I. Yogyakarta dengan kecenderungan yang terus menurun. Adapun kontribusi sektor industri pengolahan berada pada kisaran 13 persen, dengan kecenderungan yang masih berfluktuasi. Adapun sektor penyediaan akomodasi dan makan minum menunjukkan kecenderungan yang meningkat dengan kontribusi sekitar 10 persen.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya transformasi ekonomi di D.I. Yogyakarta dari sektor primer menuju sektor sekunder dan tersier. Jadi, meskipun sektor tradisional masih memegang peran penting dalam perekonomian D.I. Yogyakarta, namun kontribusinya semakin berkurang. Peran sektor tersebut mulai diambil alih oleh sektor perdagangan dan jasa.

4.3. Kemiskinan di D.I. Yogyakarta

Pada periode 2014 -2016, persentase penduduk miskin di D.I. Yogyakarta menunjukkan kecenderungan yang menurun. Penurunan persentase penduduk miskin yang cukup signifikan terjadi pada periode 2015 – 2016, dimana persentase kemiskinan turun sebanyak 1,57 poin.

Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan tahun 2014, pada tahun 2016 indeks kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan masih lebih tinggi. Angka indeks kedalaman kemiskinan sebesar 2,297 dan indeks keparahan kemiskinan 0,592. Situasi tersebut menunjukkan bahwa meskipun persentase penduduk miskin mengalami penurunan namun pengeluaran penduduk miskin dan kesenjangan antara penduduk miskin belum mengalami perbaikan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Dengan kata lain, meskipun terjadi penurunan kuantitas kemiskinan namun masih belum terlihat adanya perbaikan kualitas dari penduduk miskin.

Tabel 4.8 Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan, Indeks Keparahannya Kemiskinan dan Garis Kemiskinan D.I. Yogyakarta Tahun 2014 -2016

Uraian	2014	2015	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
Persentase Penduduk Miskin	15,00	14,91	13,34
Indeks Kedalaman Kemiskinan	2,186	2,932	2,297
Indeks Keparahannya Kemiskinan	0,484	0,834	0,592
Garis Kemiskinan (Rupiah)	313.452	335.886	354.084

Sumber : Susenas 2014 -2016, diolah

5

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Karakteristik Penduduk Menurut kelompok Pengeluaran

Tabel 5.1 memberikan gambaran mengenai pengeluaran per kapita per bulan menurut kelompok pengeluaran di D.I. Yogyakarta pada tahun 2016. Rata-rata pengeluaran untuk kelompok 10 persen terbawah adalah sejumlah 273.510 rupiah per kapita per bulan. Pengeluaran minimum pada kelompok ini tercatat sebesar 158.866 rupiah per kapita per bulan dan pengeluaran maksimumnya sebesar 327.397 rupiah per orang setiap bulannya.

Tabel 5.1 Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Menurut Kelompok Pengeluaran D.I. Yogyakarta Tahun 2016

Kelompok Pengeluaran	Pengeluaran Per Kapita Per Bulan			
	Rata-rata (Rupiah)	Minimum (Rupiah)	Maksimum (Rupiah)	Simpangan Baku (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	273.510	158.966	327.397	40.029
2	368.425	327.457	407.268	23.267
3	444.224	407.297	481.188	20.783
4	528.863	481.377	596.210	34.061
5	665.956	596.370	724.107	35.284
6	840.217	724.550	1.023.173	92.188
7	1.106.777	1.023.232	1.201.233	51.675
8	1.363.336	1.203.071	1.532.929	96.479
9	1.815.310	1.533.127	2.137.440	167.785
10	3.303.216	2.139.405	14.390.500	1.549.147

Sumber: Susenas 2016, diolah

Selanjutnya, besaran konsumsi yang dilakukan meningkat secara gradual seiring dengan meningkatnya kelompok pengeluaran. Namun pada kelompok pengeluaran 10 persen penduduk terkaya terjadi peningkatan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan kelompok pengeluaran di

bawahnya. Rata-rata pengeluaran pada kelompok 10 persen terkaya adalah sebesar 3.303.216 ribu per kapita per bulan, melonjak hampir dua kali lipat dibandingkan kelompok pengeluaran dibawahnya yang sebesar 1.815.310 ribu per orang per bulan.

5.1.1. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu variabel yang dianggap berperan cukup penting dalam masalah kesenjangan. Hal tersebut karena investasi pada sumber daya manusia mempunyai pengaruh terhadap penghasilan pendapatan.

Dalam laporannya mengenai kesenjangan di Indonesia yang diterbitkan tahun 2015, Bank Dunia menyatakan bahwa salah satu penyebab tingginya tingkat kesenjangan adalah ketidaksetaraan yang diterima oleh penduduk dalam hal pelayanan kebutuhan dasar, antara lain pendidikan.

Tabel 5.2 Persentase Penduduk Menurut Desil Kelompok Pengeluaran dan Tingkat Pendidikan D.I. Yogyakarta Tahun 2016

Kelompok Pendapat- an	Tingkat Pendidikan					Jumlah
	< SD	SD/ Sederajat	SLTP/ Sederajat	SLTA/ Sederajat	Univer- sitas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	31,03	31,59	17,48	19,17	0,73	100
2	26,46	31,90	16,90	23,45	1,30	100
3	22,57	28,88	17,11	29,76	1,68	100
4	20,09	31,37	12,99	30,98	4,57	100
5	18,71	24,96	19,13	31,88	5,32	100
6	19,10	26,00	15,78	32,17	6,94	100
7	19,21	20,14	16,78	34,76	9,11	100
8	16,29	17,38	13,91	38,13	14,29	100
9	11,38	13,10	7,63	42,85	25,04	100
10	8,80	9,75	7,22	39,21	35,01	100

Sumber: Susenas 2016, diolah

Tabel 5.2 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tingkat pendidikan yang cukup signifikan antara kelompok pendapatan. Untuk kelompok

pengeluaran 10 persen terendah terlihat bahwa lebih dari separuh penduduk yang tingkat pendidikan tertingginya hanya sampai dengan SD. Selain itu, hanya terdapat 0,73 persen penduduk pada kelompok pengeluaran ini yang berpendidikan universitas.

Sebaliknya pada kelompok pengeluaran 10 persen tertinggi, sebagian besar penduduknya merupakan tamatan SMA dan universitas. Pada kelompok ini, 39,21 persen merupakan tamatan SLTA dan 35,01 persen merupakan tamatan universitas. Hanya terdapat 8,8 persen yang berpendidikan kurang dari SD pada kelompok pengeluaran ini.

Sedangkan untuk kelompok pengeluaran menengah (kelompok 5 dan 6) sebagian besar penduduknya berpendidikan menengah ke atas. Pada kelompok ini, penduduk dengan tingkat pendidikan SLTA sebanyak 31,88 persen dan 32,17 persen. Adapun sebanyak 5,32 persen dan 6,94 persen dari kelompok pengeluaran ini merupakan tamatan universitas.

Selain itu, untuk kelompok pengeluaran menengah ke bawah terlihat bahwa proporsi penduduk yang menamatkan tingkat pendidikan menengah pertama (SLTP) hampir sama. Kondisi ini diduga terkait dengan intervensi pemerintah berupa pemberian bantuan operasional sekolah (BOS) sehingga memberikan kemudahan akses jenjang pendidikan ini bagi semua kelompok pengeluaran.

5.1.2. Kesehatan

Selain pendidikan, variabel lain yang perlu mendapat perhatian terkait dengan isu kesenjangan adalah masalah kesehatan. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat adalah dengan menggunakan angka kesakitan.

Dari tabel 5.3, terlihat bahwa angka kesakitan untuk setiap kelompok pengeluaran relatif tidak terlalu jauh berbeda. Bahkan untuk kelompok pengeluaran 10 persen terendah dan 10 persen tertinggi, persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan mengganggu aktivitas keseharian hampir sama, yaitu berada pada kisaran di bawah lima puluh persen. Pola yang sedikit berbeda justru terjadi pada kelompok pengeluaran menengah (kelompok 5 dan 6). Pada kelompok ini, persentase penduduk yang mengalami gangguan kesehatan dalam aktivitas kesehariannya justru

lebih banyak.

**Tabel 5.3 Persentase Penduduk Menurut
Desil Kelompok Pengeluaran dan Mengalami Keluhan Kesehatan
Yang Mengganggu Aktivitas Sehari-hari D.I. Yogyakarta Tahun 2016**

Kelompok Pendapatan	Mengalami Keluhan Kesehatan yang Mengganggu Aktivitas Sehari-hari	
	Ya	Tidak
(1)	(2)	(3)
1	43,86	56,14
2	44,43	55,57
3	50,15	49,85
4	56,35	43,65
5	51,35	48,65
6	54,72	45,28
7	46,69	53,31
8	46,06	53,94
9	39,53	60,47
10	43,78	56,22

Sumber: Susenas 2016, diolah

5.1.3. Lapangan Usaha

Dari gambaran mengenai struktur perekonomian di D.I. Yogyakarta terlihat adanya pergeseran dari sektor pertanian ke sektor jasa dan perdagangan. Kontribusi sektor pertanian pada tahun 2014 -2016 berkisar pada angka sekitar 10 persen dengan kecenderungan yang menurun (Gambar 4.1). Namun, dari sisi penyerapan tenaga kerja, sektor pertanian masih menjadi salah satu tumpuan utama dalam penyerapan tenaga kerja di D.I. Yogyakarta. Jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian ini masih di atas 20 persen dari total pekerja di D.I. Yogyakarta (Tabel 4.5).

Kontribusi sektor pertanian yang semakin mengecil dengan jumlah tenaga kerja yang masih besar tersebut juga berakibat pada rendahnya tingkat produktivitas di sektor ini. Dalam kaitannya dengan isu tentang kesenjangan, maka kondisi tersebut patut diduga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya kesenjangan di D.I. Yogyakarta.

**Tabel 5.4 PDRB ADHB, Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
D.I. Yogyakarta Tahun 2016**

Lapangan Usaha	PDRB 2016 ADHB (Juta Rupiah)	Tenaga Kerja 2016	Produktivitas Tenaga Kerja (Juta Rupiah/Orang)
(1)	(2)	(3)	(4)
Pertanian	11.456.173	475.256	24,11
Pertambangan, Listrik , Gas dan Air	849.715	25.529	33,28
Industri Pengolahan	14.547.753	262.034	55,52
Bangunan	10.286.734	133.774	76,90
Perdagangan Besar, Eceran, & Rumah Makan	20.587.138	590.037	34,89
Angkutan, Pergudangan, & Komunikasi	15.210.632	75.159	202,38
Keuangan	4.342.146	56.777	76,48
Jasa-jasa	32.818.050	423.789	77,44

Sumber: BPS DIY 2017, diolah

Pada tahun 2016, rata-rata produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian adalah sebesar 24,11 juta rupiah. Dibandingkan dengan sektor ekonomi lainnya, produktivitas pada sektor ini adalah yang paling kecil. Adapun sektor perekonomian dengan tingkat produktivitas yang terbesar adalah sektor angkutan, pergudangan dan komunikasi. Rata-rata produktivitas di sektor ini adalah sebesar 202,38 juta rupiah. Dengan adanya perbedaan tingkat produktivitas antar sektor ini maka kesenjangan pendapatan antar tenaga kerja merupakan suatu keniscayaan.

Tabel 5.5 memberikan gambaran mengenai persentase penduduk menurut lapangan usaha dan kelompok pengeluaran. Sebagian besar penduduk pada kelompok 10 persen pengeluaran terbawah menjadikan sektor pertanian sebagai lapangan usahanya. Proporsi penduduk yang bekerja di sektor ini mencapai lebih dari 50 persen. Adapun sebanyak 17 persen dari kelompok ini bekerja di sektor perdagangan, hotel dan rumah makan.

**Tabel 5.5 Persentase Penduduk Menurut Lapangan Usaha
dan Desil Kelompok Pengeluaran
D.I. Yogyakarta Tahun 2016**

Lapangan Usaha	Kelompok Pengeluaran									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pertanian	51,80	40,68	28,41	33,48	21,50	30,83	25,19	12,72	10,89	5,85
Pertambangan dan penggalian	1,27	1,45	1,51	0,73	0,64	0,58	0,67	1,41	0,93	1,49
Industri pengolahan	10,06	15,26	12,30	10,08	15,51	12,98	13,27	10,90	7,63	5,66
Listrik dan gas	0,19	0,18	0,90	0,00	1,14	0,34	0,52	0,19	0,90	0,30
Konstruksi/ bangunan	9,60	9,22	9,20	9,75	9,20	4,55	8,92	4,66	4,42	3,81
Perdagangan, hotel, dan rumah makan	17,27	17,18	25,03	27,98	25,84	25,86	25,70	33,03	28,19	28,26
Transportasi, pergudangan, informasi, dan komunikasi	0,34	2,29	2,59	2,10	5,04	3,93	3,07	4,54	3,87	4,08
Keuangan dan asuransi	0,42	0,17	0,64	0,65	0,42	1,29	0,76	1,03	2,68	4,45
Jasa dan Lainnya	9,05	13,57	19,42	15,23	20,72	19,64	21,91	31,52	40,49	46,11
Total	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: Susenas 2016, diolah

Sebaliknya, pada kelompok 10 persen pengeluaran teratas, sebanyak 46,11 persen penduduknya bekerja di sektor jasa. Penduduk dari kelompok pengeluaran ini yang bekerja pada sektor pertanian hanya tercatat sebesar 5,85 persen. Sementara itu, sektor perdagangan, hotel dan rumah makan menjadi lapangan pekerjaan bagi 28,26 persen penduduk di kelompok ini.

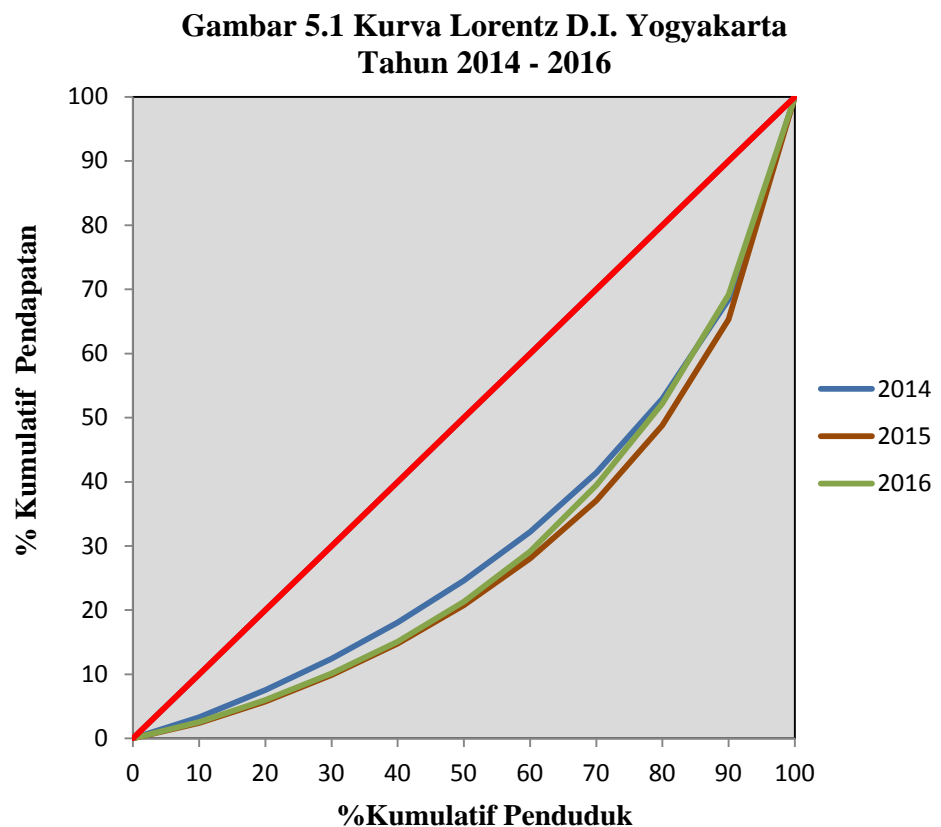
5.2. Analisis Ketimpangan

5.2.1. Gini Rasio dan Kurva Lorentz

Salah satu indikator yang sering digunakan dalam mengukur tingkat kesenjangan adalah Gini Rasio. Pada tahun 2014 – 2016, Gini Rasio untuk

D.I. Yogyakarta menunjukkan adanya fluktuasi dengan trend yang meningkat. Pada tahun 2014, angka Gini Rasio tercatat sebesar 0,389. Setahun kemudian tingkat kesenjangan di D.I. Yogyakarta mengalami peningkatan yang terlihat dari peningkatan Gini Rasio menjadi sebesar 0,433. Pada tahun 2016, Gini Rasio sedikit mengalami penurunan menjadi sebesar 0,420.

Fluktuasi tingkat kesenjangan yang dicerminkan oleh angka Gini Rasio di D.I. Yogyakarta tersebut juga terlihat dari pergerakan kurva Lorentz dari tahun 2014 sampai dengan 2016. Pada gambar 5.1, terlihat bahwa kurva Lorentz tahun 2015 bergerak semakin menjauhi garis diagonal dibandingkan dengan kurva Lorentz tahun 2014. Selanjutnya kurva Lorentz tahun 2016 kembali mendekati garis diagonal.



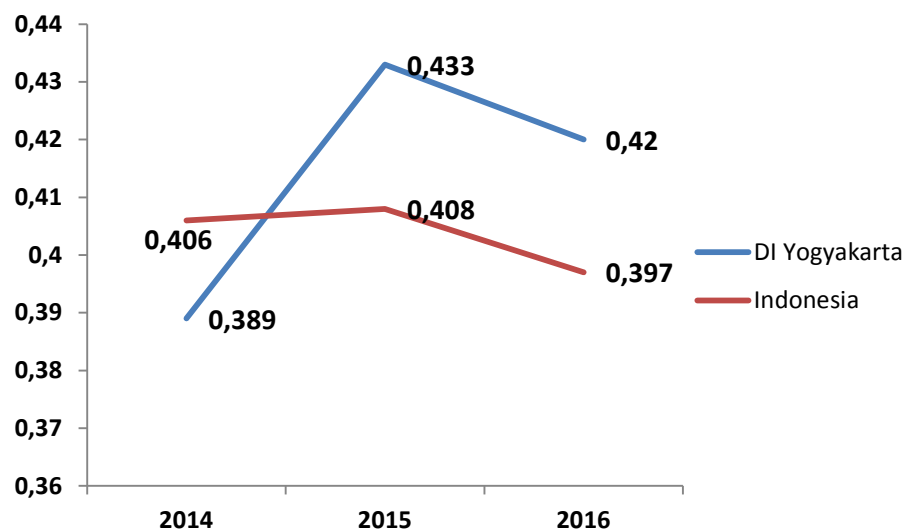
Sumber: Susenas 2014 -2016, diolah

Dengan menggunakan klasifikasi kesenjangan yang dirumuskan oleh Todaro berdasarkan angka Gini Rasio, maka tingkat kesenjangan di D.I. Yogyakarta pada kurun waktu 2014 -2016 masih tergolong dalam kategori “kesenjangan sedang”. Hal tersebut menunjukkan bahwa distribusi

pengeluaran antara kelompok kaya dan miskin tidak terlalu mengkhawatirkan. Namun demikian, yang perlu dicermati adalah trend ketimpangan yang cenderung masih meningkat dalam periode 3 tahun terakhir. Tercatat angka Gini Rasio pada tahun 2016 masih lebih besar daripada tahun 2014.

Selain itu, jika dibandingkan dengan kondisi nasional nampaknya tingkat kesenjangan di D.I. Yogyakarta masih tergolong tinggi (Gambar 4.3). Meskipun pada tahun 2014 tingkat kesenjangan di D.I. Yogyakarta lebih rendah daripada kondisi nasional, namun tingkat kesenjangan di D.I. Yogyakarta justru lebih tinggi daripada nasional pada periode dua tahun berikutnya. Selain itu, pada tahun 2016, tingkat ketimpangan di D.I. Yogyakarta juga tercatat sebagai yang tertinggi jika dibandingkan dengan tingkat ketimpangan provinsi-provinsi lainnya di Jawa (BPS, 2017).

Gambar 5.2 Gini Rasio D.I. Yogyakarta dan Indonesia Tahun 2014 - 2016



Sumber: BPS, 2017

Berdasarkan daerah tempat tinggal, ketimpangan tampak lebih jelas di daerah perkotaan yang ditunjukkan dengan angka Gini Rasio yang lebih tinggi dibanding di perdesaan. Gini Rasio di daerah perkotaan pada Maret 2016 sebesar 0,423 mengalami penurunan sebesar 0,02 poin dibanding Gini Rasio Maret 2015 yang sebesar 0,443 dan menurun sebesar 0,005 poin dari Gini Rasio September 2015 yang sebesar 0,428. Untuk daerah perdesaan Gini Rasio Maret 2016 adalah sebesar 0,334 relatif tetap dibanding Gini

Rasio Maret 2015 yang juga sebesar 0,334 serta meningkat 0,002 poin dibanding Gini Rasio September 2015 yang sebesar 0,332.

Dalam kurun waktu satu semester (Maret 2016- September 2016), angka Gini Rasio wilayah perdesaan meningkat 0,009 poin atau menjadi 0,343. Walaupun terjadi peningkatan, angka tersebut masih dalam kategori ketimpangan rendah.

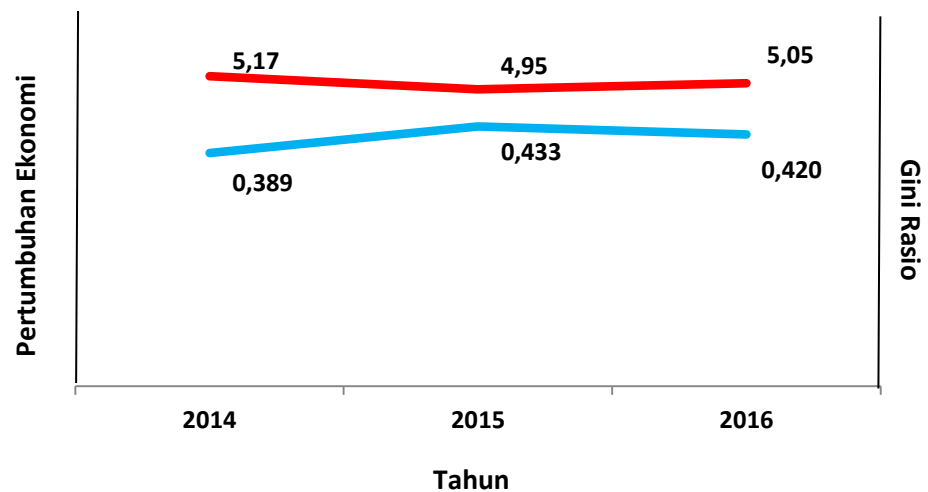
**Tabel 5.6 Gini Rasio Menurut Daerah Tempat Tinggal
D.I. Yogyakarta dan Indonesia,
Maret 2015–Maret 2016**

Wilayah/Waktu	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Daerah Istimewa Yogyakarta			
Maret 2015	0.443	0.334	0.433
September 2015	0.428	0.332	0.420
Maret 2016	0.423	0.334	0.420
September 2016	0,423	0,343	0,425
Indonesia			
Maret 2015	0.428	0.334	0.408
September 2015	0.419	0.329	0.402
Maret 2016	0.410	0.327	0.397
September 2016	0,409	0,316	0,394

Sumber: Susenas 2015-2016, diolah

Di samping itu, pada periode 2014 – 2016 juga terlihat adanya hubungan yang cukup menarik antara laju pertumbuhan ekonomi dan Gini Rasio di D.I. Yogyakarta. Sebagaimana yang ditunjukkan pada Gambar 5.3, terlihat bahwa angka Gini Rasio menunjukkan peningkatan pada saat laju pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan di tahun 2015. Selanjutnya, angka Gini Rasio mengalami penurunan bersamaan dengan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi di tahun 2016.

**Gambar 5.3 Gini Rasio dan Laju Pertumbuhan Ekonomi
D.I. Yogyakarta Tahun 2014 -2016**



Hubungan antara laju pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan telah lama menjadi bahan diskusi para ekonom. Bourguignon (2004) berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi antara lain mempengaruhi perubahan distribusi sumber daya antar sektor, balas jasa terhadap faktor produksi termasuk di dalamnya upah/gaji. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi juga mengakibatkan adanya perubahan dalam distribusi pendapatan. Program pembangunan ekonomi yang *pro poor* merupakan salah satu contoh dari upaya untuk lebih me-meratakan distribusi pendapatan.

Dari kondisi tersebut, patut diduga bahwa upaya pembangunan yang telah dilakukan pemerintah D.I. Yogyakarta berada pada jalur yang tepat untuk mengatasi kesenjangan. Meskipun demikian perlu dilakukan analisa lebih lanjut untuk meyakinkan hubungan antara kedua hal tersebut.

Tabel 5.7 menunjukkan Gini Rasio di D.I. Yogyakarta tahun 2014 - 2016. Pada periode tersebut, terlihat bahwa angka Gini Rasio Kabupaten Gunungkidul merupakan yang terendah diantara lima kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa distribusi pengeluaran di Gunungkidul merupakan yang paling baik di wilayah D.I. Yogyakarta. Adapun Kabupaten Sleman, merupakan kabupaten dengan angka Gini Rasio yang tinggi di wilayah tersebut. Dengan demikian, tingkat kesenjangan di kabupaten ini merupakan yang tertinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya di daerah DIY.

**Tabel 5.7 Gini Rasio di D.I. Yogyakarta
Tahun 2014 -2016**

Kabupaten/Kota	Gini Rasio		
	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
01 Kulon Progo	0,382	0,367	0,372
02 Bantul	0,320	0,376	0,397
03 Gunungkidul	0,296	0,319	0,334
04 Sleman	0,412	0,446	0,394
71 Yogyakarta	0,396	0,446	0,429
D.I. Yogyakarta	0,389	0,433	0,420

Sumber: Susenas 2014 -2016, diolah

Lebih lanjut, pada kurun waktu tersebut, terdapat tiga kabupaten dengan angka Gini Rasio di bawah Gini Rasio D.I. Yogyakarta. Ketiganya adalah Kabupaten Gunungkidul, Kulon Progo dan Bantul. Jika dicermati, struktur ekonomi di ketiga kabupaten tersebut masih didominasi oleh Sektor Agraris. Lebih dari 25 persen perekonomian di Gunungkidul didukung oleh sektor Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BPS Gunungkidul, 2017). Demikian juga halnya di Kabupaten Kulon Progo dimana sektor tersebut masih mendominasi perekonomian dengan kontribusi sebesar hampir seperlima bagian (BPS Kulon Progo, 2017). Di Bantul, Sektor Pertanian, Perikanan dan Kehutanan juga masih mendominasi dengan kontribusi sebesar 15,17 persen (BPS Bantul, 2017).

Sementara itu, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta yang mempunyai Gini Rasio di atas angka D.I. Yogyakarta masing-masing merupakan wilayah dengan struktur perekonomian yang lebih didominasi oleh sektor industri. Kontribusi sektor industri di Sleman tercatat sebesar 13,36 persen (BPS Sleman, 2017) dan di Kota Yogyakarta sebesar 13,68 persen (BPS Kota Yogyakarta, 2017).

Situasi tersebut nampaknya selaras dengan teori yang dikemukakan oleh Kuznet lebih dari 60 tahun yang lalu. Kuznet (dalam Prastowo dan kawan-kawan, 2014) menyatakan bahwa kondisi ketimpangan di wilayah agraris lebih kecil dibandingkan dengan wilayah industri karena rendahnya level penghasilan yang diterima oleh individu di wilayah agraris tersebut.

Adapun tingkat ketimpangan mengalami peningkatan pada wilayah dengan struktur perekonomian yang bercorak industri. Hubungan antara kedua hal tersebut digambarkan dalam Kurva U terbalik.

Meskipun mendapat berbagai kritikan, hubungan antara kesenjangan dan struktur perekonomian yang disampaikan oleh Kuznet tersebut layak untuk dianalisa lebih lanjut. Hal tersebut terutama untuk lebih menjelaskan pola hubungan antara struktur perekonomian dan tingkat kesenjangan yang terjadi di wilayah D.I. Yogyakarta.

5.2.2. Kriteria Bank Dunia

Salah satu kriteria kesenjangan yang diukur oleh Bank Dunia adalah dengan melihat persentase pengeluaran yang dilakukan oleh 40 persen penduduk berpendapatan terendah terhadap total pengeluaran di suatu wilayah. Tabel 5.8 menunjukkan persentase pengeluaran yang dilakukan oleh kelompok penduduk menurut kriteria Bank Dunia di D.I. Yogyakarta tahun 2014 – 2016.

Dari tabel tersebut terlihat bahwa pada tahun 2014, sebanyak 40% dari penduduk dengan pendapatan terendah mengkonsumsi sebanyak 18,06 persen dari total konsumsi D.I. Yogyakarta. Kondisi itu menempatkan D.I. Yogyakarta sebagai daerah dengan tingkat kesenjangan yang tergolong rendah menurut kriteria Bank Dunia.

Namun pada tahun 2015, tingkat ketimpangan di wilayah ini meningkat yang ditandai dengan turunnya konsumsi 40% penduduk berpendapatan terendah. Kelompok penduduk ini hanya melakukan konsumsi sebesar 14,79 persen dari total konsumsi wilayah. Dengan demikian pada tahun 2015, D.I. Yogyakarta dikategorikan sebagai daerah dengan tingkat kesenjangan menengah menurut kriteria Bank Dunia.

Pada tahun 2016, persentase pengeluaran dari 40% kelompok pendapatan terendah sedikit meningkat dari tahun sebelumnya menjadi 15,08 persen dari total konsumsi penduduk. Namun demikian, tingkat kesenjangan menurut kriteria Bank Dunia masih menempatkan D.I. Yogyakarta pada kategori kesenjangan menengah.

**Tabel 5.8 Persentase Pengeluaran oleh Penduduk
Menurut Kriteria Bank Dunia di D.I. Yogyakarta
Tahun 2014 -2016**

Kabupaten/Kota	2014			2015			2016		
	40% pddk penda- patan rendah	40% pddk penda- patan mene- ngah	20% pddk penda- patan tinggi	40% pddk penda- patan rendah	40% pddk penda- patan mene- ngah	20% pddk penda- patan tinggi	40% pddk penda- patan rendah	40% pddk penda- patan mene- ngah	20% pddk penda- patan tinggi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
01 Kulon Progo	18,92	34,29	46,78	18,03	36,00	45,98	17,87	37,43	44,69
02 Bantul	21,34	37,55	41,11	16,76	36,12	47,12	16,22	38,06	45,72
03 Gunungkidul	22,71	37,29	40,00	20,01	36,11	43,88	19,76	39,16	41,07
04 Sleman	16,53	35,30	48,17	14,21	34,31	51,48	15,51	39,80	44,69
71 Yogyakarta	17,01	36,10	46,90	14,60	37,56	47,84	12,94	39,90	47,16
D.I. Yogyakarta	18,06	34,88	47,06	14,79	34,02	51,18	15,08	37,13	47,79

Sumber: Susenas 2014 -2016, diolah

Sejalan dengan angka Gini Rasio, penggunaan kriteria Bank Dunia untuk mengukur tingkat kesenjangan juga menunjukkan bahwa tingkat kesenjangan di Gunungkidul merupakan yang paling rendah diantara kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta. Selama periode 2014 – 2016, pangsa pengeluaran untuk 40 persen penduduk terendah di Gunungkidul berturut – turut tercatat sebesar 22,71%; 20,01% dan 19,76%. Demikian juga halnya dengan Kulon Progo yang mempunyai pangsa pengeluaran untuk 40% penduduk terendah di atas 17 persen selama kurun waktu yang sama merupakan kabupaten dengan tingkat kesenjangan dalam kategori yang rendah.

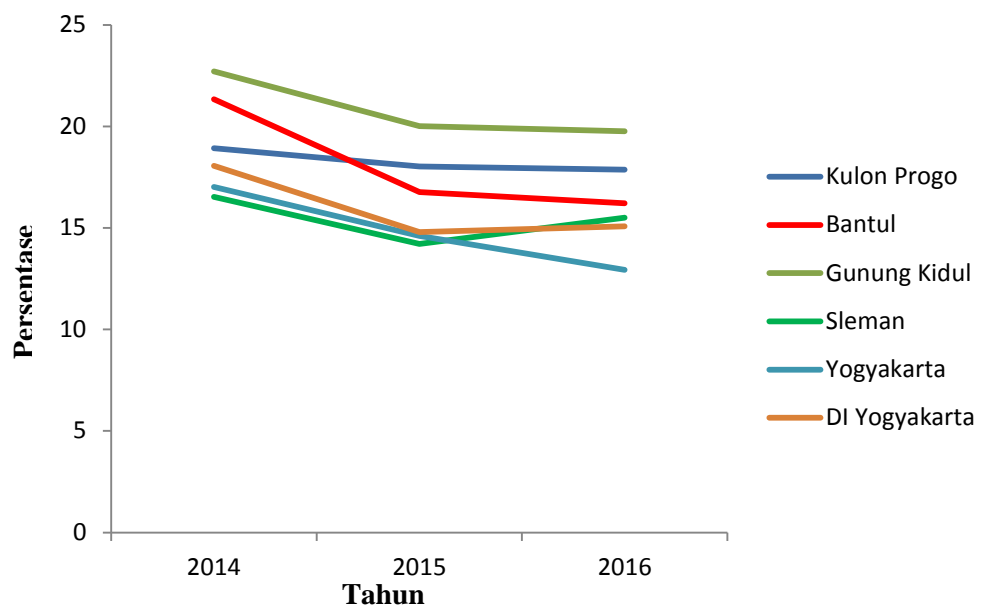
Adapun Bantul, pada tahun 2014, termasuk dalam kategori wilayah dengan tingkat kesenjangan yang rendah. Namun, pada tahun 2015 dan 2016, tingkat kesenjangan di kabupaten ini termasuk dalam kategori sedang seiring dengan penurunan pangsa pengeluaran dari 40% penduduk terendah. Senada dengan Bantul, Kota Yogyakarta yang pada tahun 2014 tergolong dalam kategori kesenjangan rendah. Namun pada tahun 2015 dan 2016, tingkat kesenjangan di wilayah ini termasuk dalam kategori sedang.

Sedangkan Sleman, pada rentang waktu 2014 – 2016, tercatat sebagai

wilayah dengan tingkat kesenjangan yang moderat. Pangsa pengeluaran untuk 40% penduduk berpendapatan terendah berada dibawah 17 persen selama tiga tahun berturut-turut.

Dari kondisi tersebut, yang perlu mendapat perhatian adalah kondisi di Gunungkidul dan Kulon Progo. Meskipun selama tiga tahun terakhir proporsi pengeluaran dari 40% penduduk berpendapatan terendah lebih dari 17 persen, namun trendnya menunjukkan penurunan. Hal tersebut sebagaimana yang dapat dilihat pada Gambar 5.4. Dengan semakin menurunnya proporsi pengeluaran dari 40% penduduk berpendapatan terendah dikhawatirkan akan terjadi peningkatan ketimpangan di wilayah ini.

Gambar 5.4 Perkembangan Pangsa Konsumsi untuk 40% Penduduk Berpendapatan Terendah di D.I. Yogyakarta Tahun 2014-2016



Sumber: Susenas 2014 -2016, diolah

5.2.3. Indeks Palma

Indikator kesenjangan yang dikembangkan oleh Gabriele Palma pada tahun 2006 ini relatif cukup sederhana dan mudah dipahami. Indeks ini dihitung dengan cara membandingkan pendapatan antara 10 persen penduduk terkaya dengan 40 persen penduduk termiskin.

Pada tahun 2014, Indeks Palma di D.I. Yogyakarta sebesar 1,75. Hal tersebut berarti bahwa pangsa pengeluaran untuk 10% penduduk terkaya adalah sebesar 1,75 kali lebih tinggi daripada konsumsi yang dilakukan oleh

40% penduduk termiskin. Kondisi tersebut juga dapat diartikan bahwa distribusi pengeluaran di D.I. Yogyakarta 7 kali menjauh dari kesetaraan sempurna.

Namun pada tahun 2015 dan 2016, Indeks Palma meningkat menjadi 2,345 dan 2,047. Dengan kata lain terjadi peningkatan disparitas antara pengeluaran 10% penduduk terkaya dengan pengeluaran 40% penduduk termiskin di D.I. Yogyakarta.

Selanjutnya, jika menilik angka gini rasio pada tahun 2015 sebesar 0,433 dan tahun 2016 sebesar 0,420 atau turun 0,013 poin. Sementara itu pada saat yang bersamaan Indeks Palmanya juga mengalami penurunan 0,29 poin. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan di DIY mengalami penurunan yang riil yang dibuktikan dengan menurunkan angka gini rasio dan Indeks Palma tetapi kecenderungan percepatan menikmati dari pendapatan D.I. Yogyakarta untuk penduduk golongan atas lebih besar dari golongan 40 persen terbawah (miskin). Jika ini terus berlanjut tidak menutup kemungkinan angka gini rasio akan mengalami peningkatan kembali.

**Tabel 5.9 Indeks Palma di D.I. Yogyakarta
Tahun 2014 -2016**

Kabupaten/Kota	Indeks Palma		
	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
01 Kulon Progo	1,651	1,563	1,577
02 Bantul	1,263	1,660	1,743
03 Gunungkidul	1,102	1,254	1,314
04 Sleman	1,940	2,346	1,867
71 Yogyakarta	1,815	2,405	2,417
D.I. Yogyakarta	1,750	2,345	2,047

Sumber: Susenas 2014 -2016, diolah

Indeks Palma untuk kabupaten dan kota di D.I. Yogyakarta menunjukkan bahwa di Gunungkidul, Kulon Progo dan Bantul berada pada kisaran angka dibawah 2. Kondisi ini menunjukkan bahwa di daerah tersebut, proporsi pengeluaran antara 10 persen kelompok pengeluaran tertinggi dengan 40 persen kelompok terendah tidak terlalu berbeda secara signifikan.

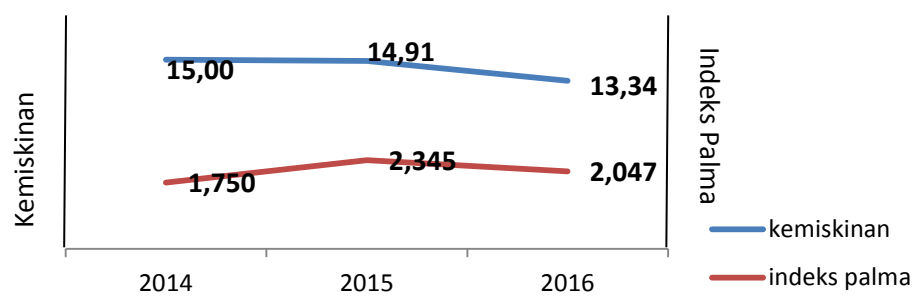
Kondisi sebaliknya terjadi di Sleman dan Kota Yogyakarta, dimana angka Indeks Palma berada pada kisaran 2 atau mendekati 2. Dengan kata

lain, tingkat pengeluaran dari 10 persen kelompok terkaya sebanyak dua kali lipat daripada 40 persen kelompok termiskin.

Kota Yogyakarta merupakan satu-satunya wilayah di D.I. Yogyakarta dengan Indeks Palma yang terus meningkat dalam rentang waktu 2014 – 2016. Indeks Palma pada tahun 2014 masih tercatat sebesar 1,815. Setahun kemudian Indeks Palma melonjak menjadi 2,405. Pada tahun berikutnya, Indeks Palma kembali mengalami kenaikan menjadi 2,417. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan yang semakin meningkat antara 10% penduduk terkaya dengan 40% penduduk termiskin di Kota Yogyakarta. Jika pada tahun 2014, konsumsi 10% penduduk terkaya sebesar 1,8 kali dari pengeluaran 40% penduduk termiskin. Pada tahun 2016, disparitas konsumsi antara 10% penduduk terkaya dengan 40% penduduk termiskin meningkat menjadi 2,4 kali.

Jika dikaitkan dengan struktur perekonomian, maka terlihat bahwa angka Indeks Palma di wilayah agraris (Gunungkidul, Kulon Progo dan Bantul) menunjukkan tingkat yang lebih rendah daripada di wilayah dengan struktur perekonomian non-agraris (Sleman dan Kota Yogyakarta). Kondisi tersebut sejalan dengan angka Gini Rasio yang juga cenderung lebih rendah pada kabupaten bercorak agraris dan meningkat pada kabupaten/kota non-agraris.

**Gambar 5.5 Persentase Penduduk Miskin dan Indeks Palma
D.I. Yogyakarta Tahun 2014 -2016**



Sumber: Susenas 2014 – 2016, diolah

Sementara itu, pada tahun 2015, ketika persentase penduduk miskin turun dari 15 persen menjadi 14,91 persen terlihat bahwa Indeks Palma justru mengalami peningkatan dari 1,750 menjadi 2,345. Namun demikian jika dibandingkan dengan indeks kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan (Tabel 4.8) terlihat bahwa pada tahun 2015, indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan

kemiskinan juga mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan turunnya persentase penduduk miskin yang tidak disertai dengan peningkatan kualitas penduduk miskin dikonfirmasi oleh Indeks Palma.

Selanjutnya, pada tahun 2016, dimana persentase penduduk miskin turun secara signifikan menjadi 13,34 persen (diikuti juga oleh penurunan indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan) terlihat bahwa Indeks Palma juga turun secara signifikan menjadi 2,047. Dengan demikian, pada tahun 2016, selain terjadi penurunan jumlah penduduk miskin secara kuantitatif nampaknya terjadi juga perbaikan kualitas penduduk miskin.

6

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. a. Hasil penghitungan angka Gini Rasio tahun 2014 – 2016 menunjukkan adanya fluktuasi kesenjangan di D.I. Yogyakarta dengan trend yang meningkat. Pada tahun 2014, angka Gini Rasio tercatat sebesar 0,389. Setahun kemudian Gini Rasio menjadi sebesar 0,433. Dan pada tahun 2016, Gini Rasio tercatat sebesar 0,420.

Fluktuasi tingkat kesenjangan yang dicerminkan oleh angka Gini Rasio di D.I. Yogyakarta tersebut juga terlihat dari pergerakan kurva Lorentz yang semakin menjauh dari garis kesetaraan.

- b. Dengan menggunakan kriteria Bank Dunia, terlihat adanya ketimpangan yang meningkat pada periode 2014 – 2016 di D.I. Yogyakarta. Dalam periode tersebut, kategori tingkat ketimpangan di wilayah tersebut menurun dari sebelumnya tergolong kriteria “ketimpangan rendah” menjadi “ketimpangan menengah”.
2. Perbandingan antara wilayah perkotaan dan perdesaan di D.I. Yogyakarta menunjukkan bahwa ketimpangan di daerah perkotaan cenderung lebih tinggi daripada di daerah perdesaan. Meskipun demikian, mulai terlihat peningkatan Gini Rasio di daerah perdesaan meskipun masih dalam kategori yang rendah.

Dari ketiga indikator kesenjangan yang digunakan, terlihat bahwa untuk daerah dengan struktur ekonomi yang bercorak agraris (Gunungkidul, Kulon Progo dan Bantul) tingkat kesenjangan relatif lebih rendah dibandingkan dengan wilayah dengan struktur ekonomi yang bercorak non-agraris (Sleman dan Kota Yogyakarta). Kondisi di D.I. Yogyakarta ini nampaknya sejalan dengan teori yang

dikembangkan oleh Simon Kuznet, dimana tingkat pengeluaran antar kelompok masyarakat di daerah pertanian cenderung homogen. Selanjutnya seiring dengan transformasi dari sektor pertanian menuju sektor industri dan jasa, tingkat pengeluaran antar kelompok mengalami disparitas.

- 3. a.** Dari hasil Susenas 2016, terlihat bahwa tingkat pendidikan kelompok pengeluaran terendah jauh tertinggal dibandingkan dengan penduduk kelompok pengeluaran tertinggi. Lebih dari separuh penduduk dari kelompok pengeluaran terendah hanya mempunyai tingkat pendidikan SD ke bawah. Sementara tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh separuh penduduk kelompok pengeluaran tertinggi adalah SLTA ke atas.
- b.** Dari sisi ketenagakerjaan, sebagian besar penduduk dari kelompok pengeluaran terendah bekerja pada sektor pertanian. Sementara itu, pada saat yang sama sebagian besar penduduk dari kelompok pengeluaran tertinggi bekerja pada sektor Jasa.
Lebih lanjut, dengan membandingkan struktur ekonomi D.I. Yogyakarta dan struktur ketenagakerjaan, terlihat bahwa salah satu faktor yang menyebabkan peningkatan kesenjangan pengeluaran adalah kesenjangan produktivitas tenaga kerja.
- 4. a.** Penghitungan Indeks Palma juga memperlihatkan adanya peningkatan disparitas pengeluaran antara 10 persen kelompok terkaya terhadap 40 persen kelompok termiskin. Pada kurun waktu 3 tahun terakhir, Indeks Palma meningkat dari 1,75 menjadi 2,047. Oleh karena itu perlu adanya usaha untuk memperkecil kesenjangan tersebut.
- b.** Selain itu, “kue pembangunan” di D.I. Yogyakarta masih lebih banyak dinikmati oleh kelompok pengeluaran atas, yang bergerak di sektor Jasa. Hal ini mengingat bahwa pembangunan di D.I. Yogyakarta berbasiskan pada pariwisata dan pendidikan.

6.2. Saran

Dari kondisi tersebut, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi tingkat kesenjangan pengeluaran di D.I. Yogyakarta:

1. Perlu adanya upaya untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian untuk mengejar ketertinggalan dari sektor lainnya.
2. Perlu adanya upaya untuk mendorong transfer surplus tenaga kerja di sektor pertanian ke sektor ekonomi kreatif dengan mengadakan pelatihan maupun kursus keterampilan termasuk penguatan pangsa pasar dan program “bapak asuh”.
3. Hampir separuh dari tenaga kerja yang ada berlatar belakang tingkat pendidikan menengah ke bawah. Oleh karena itu, perlu dibuat program untuk menjaga tingkat APM (Angka Partisipasi Murni) agar tidak turun dan meningkatkan target APM untuk level Sekolah Menengah.
4. Dalam jangka pendek, intervensi terhadap kelompok pengeluaran terbawah dapat dilakukan dengan melanjutkan program raskin maupun bantuan tunai. Namun demikian kebijakan ini perlu selalu dimonitor dan dievaluasi mengingat dalam jangka panjang dapat menyebabkan ketergantungan dan inefisiensi anggaran.
5. Perlu dibuatkan program pengelolaan ekonomi (pariwisata) berbasis komunitas dengan mengedepankan modal sosial (kultur Jogjakarta). Program tersebut harus mengutamakan keterlibatan dari kelompok masyarakat pengeluaran terbawah.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2015. *Statistik Ketenagakerjaan Daerah Istimewa Yogyakarta 2014 – 2015*. Bantul, BPS Provinsi DIY
- Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2016. *Statistik Ketenagakerjaan Daerah Istimewa Yogyakarta 2015 – 2016*. Bantul, BPS Provinsi DIY
- Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2017. *Statistik Ketenagakerjaan Daerah Istimewa Yogyakarta 2016 – 2017*. Bantul, BPS Provinsi DIY
- Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2017. *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha 2012 - 2016*. Bantul, BPS Provinsi DIY
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kabupaten Bantul, 2017. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bantul Menurut Lapangan Usaha 2012 - 2016*. Bantul, BPS Kabupaten Bantul
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kabupaten Gunungkidul, 2017. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Gunungkidul Menurut Lapangan Usaha 2012 - 2016*. Gunungkidul, BPS Kabupaten Gunungkidul
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kabupaten Kulon Progo, 2017. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kulon Progo Menurut Lapangan Usaha 2012 - 2016*. Kulon Progo, BPS Kabupaten kulon Progo
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kabupaten Sleman, 2017. *Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Sleman 2012 -2016*. Sleman, BPS Kabupaten Sleman
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kota Yogyakarta, 2017. *Produk Domestik Regional Bruto Kota Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha 2012 - 2016*. Yogyakarta, BPS Kota Yogyakarta
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kabupaten Gunungkidul, 2017. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Gunungkidul Menurut Lapangan Usaha*. Gunungkidul, BPS Kabupaten Gunungkidul

- Bourguignon, Francois, 2004. *The Poverty-Growth-Inequality Triangle*. Work paper presented at the Indian Council for Research on International Economic Relations. New Delhi
- Cobham, Alex., Schlogl, Luke., Sumner, Andy., 2015, *Inequality and the Tails: The Palma Proposition and Ratio Revisited*, UNDESA Working Paper 143. New York, UN Department of Economic & Social Affairs
- Haughton, Jonathan, Khandker, Shahidur R., 2009. *Handbook on Poverty and Inequality*. Washington DC, The World Bank
- Perkins, Dwight H., Radelet, Steven C., Lindauer, David L., 2006. *Economics of Development (Sixth Edition)*. New York, W.W Norton
- Prastowo, Yustinus, dkk., 2014. *Ketimpangan Pembangunan di Indonesia dari Berbagai Aspek*. Jakarta, infid
- The Palma, <http://uncounted.org/palma/>. Kunjungan pada tanggal 27 September 2017
- World Bank, 2015. *Indonesia's Rising Divide; Executive Summary*. Jakarta, The World Bank Office Jakarta.



LAMPIRAN

**Tabel 1. Distribusi Pengeluaran Per Kapita Menurut Kelompok Desil
di D.I. Yogyakarta Tahun 2014 -2016**

Kelompok Desil	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
1	3,34	2,63	2,56
2	4,24	3,57	3,44
3	4,85	4,33	4,17
4	5,63	5,12	4,92
5	6,53	6,17	6,23
6	7,61	7,41	7,83
7	9,20	8,99	10,36
8	11,54	11,51	12,72
9	15,45	16,01	16,92
10	31,61	34,26	30,87

Sumber: Susenas 2014 -2016, diolah

**Tabel 2. Distribusi Pengeluaran Per Kapita Menurut Kelompok Desil
di Kulon Progo Tahun 2014 -2016**

Kelompok Desil	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
1	3,72	3,33	3,21
2	4,39	4,47	4,19
3	5,12	5,15	4,75
4	5,69	6,15	5,72
5	6,18	6,94	6,64
6	7,42	8,02	8,34
7	8,97	9,15	10,05
8	11,73	11,23	12,40
9	15,54	15,70	16,51
10	31,24	29,86	28,18

Sumber: Susenas 2014 -2016, diolah

**Tabel 3. Distribusi Pengeluaran Per Kapita Menurut Kelompok Desil
di Bantul Tahun 2014 -2016**

Kelompok Desil	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
1	3,99	3,01	2,96
2	5,02	4,10	3,72
3	5,77	4,93	4,39
4	6,56	5,79	5,15
5	6,77	6,85	6,25
6	9,07	8,46	7,80
7	10,08	10,10	11,18
8	11,64	12,07	12,83
9	14,17	15,09	17,46
10	26,95	29,60	28,26

Sumber: Susenas 2014 -2016, diolah

**Tabel 4. Distribusi Pengeluaran Per Kapita Menurut Kelompok Desil
di Gunung Kidul Tahun 2014 -2016**

Kelompok Desil	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
1	4,25	3,73	3,41
2	5,47	4,88	4,59
3	6,12	5,81	5,47
4	6,88	6,79	6,29
5	7,58	7,69	7,32
6	8,48	8,75	8,80
7	9,97	9,88	10,62
8	11,27	11,58	12,42
9	14,96	14,30	15,12
10	25,04	26,60	25,96

Sumber: Susenas 2014 -2016, diolah

**Tabel 5. Distribusi Pengeluaran Per Kapita Menurut Kelompok Desil
di Sleman Tahun 2014 -2016**

Kelompok Desil	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
1	3,06	2,43	2,64
2	3,72	3,35	3,40
3	4,47	4,14	4,29
4	5,28	5,09	5,18
5	6,06	6,11	7,48
6	7,49	7,17	8,66
7	9,87	8,70	10,70
8	11,88	12,15	12,96
9	16,10	15,65	15,74
10	32,07	35,21	28,95

Sumber: Susenas 2014 -2016, diolah

**Tabel 6. Distribusi Pengeluaran Per Kapita Menurut Kelompok Desil
di Kota Yogyakarta Tahun 2014 -2016**

Kelompok Desil	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
1	2,97	2,16	2,06
2	3,82	2,92	2,84
3	4,69	3,93	3,48
4	5,52	4,98	4,55
5	6,58	6,47	7,22
6	7,89	7,61	9,03
7	9,53	9,68	10,79
8	12,09	12,78	12,85
9	16,03	15,82	15,89
10	30,87	33,64	31,28

Sumber: Susenas 2014 -2016, diolah

**Tabel 7. Perubahan Proporsi Pengeluaran Per Kapita Menurut Kelompok Desil
di D.I. Yogyakarta Tahun 2014 -2016**

Kelompok Desil	2014 – 2015	2015 – 2016
(1)	(2)	(3)
1	-0,71	-0,07
2	-0,67	-0,13
3	-0,52	-0,16
4	-0,51	-0,20
5	-0,36	0,06
6	-0,20	0,42
7	-0,21	1,37
8	-0,03	1,21
9	0,56	0,91
10	2,65	-3,39

Sumber: Susenas 2014 -2016, diolah

**Tabel 8. Perubahan Gini Rasio di D.I. Yogyakarta
Tahun 2014 -2016**

Kabupaten/Kota	Perubahan Gini Rasio	
	2014 – 2015	2015 – 2016
(1)	(2)	(3)
Kulon Progo	-0,014	0,004
Bantul	0,056	0,021
Gunungkidul	0,023	0,015
Sleman	0,034	-0,052
Kota Yogyakarta	0,050	-0,017
D.I. Yogyakarta	0,044	-0,013

Sumber: Susenas 2014 -2016, diolah

**Tabel 9. Perubahan Indeks Palma di D.I. Yogyakarta
Tahun 2014 -2016**

Kabupaten/Kota	Perubahan Indeks Palma	
	2014 – 2015	2015 – 2016
(1)	(2)	(3)
Kulon Progo	-0,088	0,014
Bantul	0,397	0,082
Gunungkidul	0,152	0,059
Sleman	0,406	-0,479
Kota Yogyakarta	0,590	0,012
D.I. Yogyakarta	0,439	-0,142

**Tabel 10. Jumlah Penduduk di D.I. Yogyakarta
Tahun 2014 -2016**

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk		
	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
Kulon Progo	405.222	412.198	416.368
Bantul	968.632	971.511	983.527
Gunungkidul	698.825	715.282	722.479
Sleman	1.163.970	1.167.481	1.180.479
Kota Yogyakarta	400.467	412.704	417.744
D.I. Yogyakarta	3.637.116	3.679.176	3.720.912

Sumber: BPS DIY, 2015-2017

**Tabel 11. Laju Pertumbuhan Ekonomi di D.I. Yogyakarta
Tahun 2014 -2016**

Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan Ekonomi		
	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
Kulon Progo	4,57	4,62	4,76
Bantul	5,04	4,97	5,06
Gunungkidul	4,54	4,82	4,89
Sleman	5,30	5,18	5,25
Kota Yogyakarta	5,28	5,09	5,11
D.I. Yogyakarta	5,17	4,95	5,05

Sumber: BPS DIY, 2017

Tabel 12. Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan, Indeks Keparahan Kemiskinan dan Garis Kemiskinan di D.I. Yogyakarta Tahun 2014

Kabupaten/ Kota	Jumlah Pen- duduk Miskin (Ribu)	Persentase Penduduk Miskin	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahan Ke- miskinan	Garis Ke- miskin- an
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kulon Progo	84,67	20,64	3,22	0,69	265.575
Bantul	153,49	15,89	2,44	0,59	301.986
Gunungkidul	148,39	20,83	3,74	1,03	243.847
Sleman	110,44	9,5	1,15	0,22	306.961
Kota Yogyakarta	35,60	8,67	1,14	0,26	366.520
D.I. Yogyakarta	544,87	15,00	2,19	0,48	313.452

Sumber: Susenas 2014, diolah

Tabel 13. Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan, Indeks Keparahan Kemiskinan dan Garis Kemiskinan di D.I. Yogyakarta Tahun 2015

Kabupaten/ Kota	Jumlah Pen- duduk Miskin (Ribu)	Persentase Penduduk Miskin	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahan Ke- miskinan	Garis Ke- miskin- an
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kulon Progo	88,13	21,40	4,16	1,24	273.436
Bantul	160,15	16,33	3,16	0,89	312.514
Gunungkidul	155	21,73	4,55	1,33	250.630
Sleman	110,96	9,46	1,46	0,37	318.312
Kota Yogyakarta	35,98	8,75	1,06	0,23	383.966
D.I. Yogyakarta	550,22	14,91	2,932	0,834	335.886

Sumber: Susenas 2015, diolah

Tabel 13. Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan, Indeks Keparahan Kemiskinan dan Garis Kemiskinan di D.I. Yogyakarta Tahun 2016

Kabupaten/ Kota	Jumlah Pen- duduk Miskin (Ribu)	Persentase Penduduk Miskin	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahan Ke- miskinan	Garis Ke- miskin- an
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kulon Progo	84,34	20,30	3,55	1,00	297.353
Bantul	142,76	14,55	2,02	0,41	332.057
Gunungkidul	139,15	19,34	4,16	1,30	264.637
Sleman	96,63	8,21	1,36	0,34	334.406
Kota Yogyakarta	32,06	7,70	1,05	0,19	401.193
D.I. Yogyakarta	494,93	13,34	2,30	0,59	354.084

Sumber: Susenas 2016, diolah

